

BAB II
DINAMIKA HUBUNGAN ISLAM DAN BARAT
DALAM RENTANG SEJARAH

A. Islam versus Barat: Hubungan Penuh Kesalahpahaman

Islam dan Barat ramai diperbincangkan, terutama pasca tragedi 9/11. Tragedi yang menurut Huntington menjadi pembuktian datangnya musuh baru bagi Barat pasca Perang Dingin, merupakan fenomena kesekian kali yang menjadikan Islam dan Barat berada dalam posisi berhadapan-hadapan sebagai musuh. Sebelumnya, Islam dan Barat juga terlibat perang panjang bernama Perang Salib (*Crusades*).

Bahasan dalam tesis ini tidak akan menggeneralisir makna Islam dan Barat. Islam diartikan sebagai agama dan peradaban yang ikut menciptakan ragam wacana ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Sementara Barat merupakan ideologi sekular-liberal yang direpresentasikan oleh Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Artinya, Barat bisa dimaknai sebagai Barat-Kristen atau Barat-Yahudi.

Dalam pembahasan berikutnya, peneliti mendeskripsikan konflik demi konflik yang pernah diukir Islam dan Barat. Menurut Tehranian (2005: 22), konflik demi konflik ternyata diawali oleh prasangka dan kesalahpahaman. Dan ini pula yang membedakan hubungan Islam dan Barat dengan Hindu atau Budha dan Barat. Meskipun ada konflik, namun konflik Hindu atau Budha dengan Barat tidaklah kompleks sebagaimana konflik Islam dan Barat.

Pemaknaan Islam dan Barat ini peneliti korelasikan dengan fluktuasi hubungan keduanya yang seringkali dipicu oleh persoalan ideologi atau keagamaan dan kemudian melebar ke ranah politik, ekonomi dan sebagainya. Pertentangan antara dua ideologi ini sebenarnya sudah pernah diramalkan oleh Fukuyama (1992: 211-212). Fukuyama beranggapan, musuh ideologi sekular-liberal hanyalah Islam. Dan hanya ideologi sekular-liberal yang efektif membentuk pemerintahan yang rasional.

Sebelum Fukuyama meramalkan hal ini, Islam dan Barat sudah terlibat konflik berkepanjangan yang faktor penyebabnya berkuat masalah agama, politik dan ekonomi. Islam -yang direpresentasikan dinasti-dinasti atau negara di Timur-Tengah- dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan negara-negara Kristen dan Yahudi.

Dalam bahasan berikutnya, peneliti akan membagi rentetan konflik Islam dan Barat dalam dua fase, yaitu fase pra tragedi WTC dan pasca tragedi WTC. Pembagian ini untuk memudahkan peneliti dalam menelaah konflik demi konflik yang terjadi berikut motifnya. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam menelaah perkembangan konflik yang melibatkan Islam dan Barat.

B. Hubungan Islam dan Barat Pra Tragedi WTC

Tragedi robohnya menara kembar *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001 memberikan implikasi luas bagi dinamika politik dunia, utamanya menyangkut hubungan antara Islam dan Barat. Meskipun pelaku tragedi masih kontroversial, namun runtuhnya ikon ekonomi Amerika Serikat

itu sekaligus mengusung popularitas gerakan Islam Militan, Al-Qaeda¹ khususnya dan alumni “*Virtual Universities for Future Islamic Radicalism*”² umumnya yang dituduh sebagai pelaku utama tragedi tersebut (Jervis, 2002: 37-54).

Tuduhan ini kemudian diperkuat oleh pelbagai aksi terorisme di beberapa negara. Diasumsikan bahwa pelakunya adalah kaum fundamentalisme.³ Menurut Machasin (2004: 791) gerakan fundamentalisme Islam seringkali dikaitkan dengan tindakan-tindakan destruktif, seperti pengeboman tempat keramaian, rumah ibadah dan sebagainya. Kaum

¹ Tujuan Al-Qaeda adalah menegakkan kembali sistem *Khilafah Islamiyah* untuk menggantikan sistem negara bangsa yang dianggap impor dari Barat. Pendirian Al-Qaeda itu bisa dilihat dari sikap politik Al-Jihad pimpinan Ayman Al-Zawahiri yang mengecam sikap *Al-Ikhwan Al-Muslimun* karena menerima sistem demokrasi Barat dengan bersedia ikut pemilu di Mesir dan duduk di parlemen. Mengenai sepak terjang Al-Qaeda dan Osama bin Laden. Selengkapnya baca *Negara Tuhan: the Thematic Encyclopaedia*, 2004: 583).

² “*Virtual Universities For Future Islamic Radicalism*” adalah perkumpulan para mujahidin yang direkrut oleh Amerika Serikat terkait dengan upaya memerangi komunisme. Amerika Serikat memandang bahwa komunisme yang direpresentasikan Uni Soviet merupakan musuh bersama yang harus diperangi. Dinas intelijen Amerika Serikat, Inggris dan Pakistan (CIA, MI6 dan ISI) melakukan perekrutan mujahidin yang siap berperang melawan Uni Soviet. Antara tahun 1982-1992 tercatat sebanyak 35.000 muslim militan direkrut untuk misi ini. mereka notabene muslim militan dan radikal dari 43 negara muslim yang berasal dari Timur Tengah, Afrika Utara dan Timur, Asia Tengah dan Asia Timur termasuk Indonesia. Semua anggota ini didaulat untuk melakukan peperangan dengan semangat jihad yang tinggi melawan Uni Soviet yang dianggap sebagai “*Atheism State*” di mata mujahidin dan “*Communism Peril*” di mata Amerika Serikat (Maftuh, 2004: 566).

³ Frans Magnis-Suseno memahami fundamentalisme sebagai sebuah pandangan teologis atau penghayatan keagamaan dimana seseorang mendasarkan seluruh pandangan-pandangan dunianya, nilai-nilai hidupnya, pada ajaran eksplisit agamanya. Istilah fundamentalisme dengan merujuk pada tradisi kitab-kitab suci erat kaitannya dengan istilah skripturalisme. Untuk pertama kalinya, istilah fundamentalisme muncul dalam *The Shorter Oxford English Dictionary* pada 1923, setelah terbit dua belas risalah teologis yang berjudul “*The Fundamentalists: A Testimony to the Truth*” (Syarkun, 2004: 439-440). Menurut Tariq Ramadhan (2002: 29) aplikasi nilai-nilai keislaman yang kurang proporsional memberikan implikasi negatif terhadap pencitraan Islam. Dalam level yang lebih umum, keadaan ini bisa mencitrakan bahwa Islam adalah agama yang bertentangan dengan komunitas selain muslim.

fundamentalisme juga seringkali dipahami sebagai aliran yang melegalkan kekerasan atas nama agama.

Dugaan bahwa umat Islam sebagai pelaku, memberikan implikasi luas. Implikasi paling dominan, *pertama*, terjadinya kecurigaan yang berlebihan terhadap umat Islam di pelbagai belahan dunia, terutama mereka yang dipandang sebagai sarang fundamentalis dan teroris. *Kedua*, ukuran teman dan lawan diukur dengan ada dan tidaknya teroris pada negara tertentu. *Ketiga*, dijadikannya tragedi 9/11 sebagai referensi utama dalam menangkap anggota jaringan yang diduga sebagai teroris. Dalam hal ini, Amerika Serikat menjadi motornya dengan mengusung jargon “*combating terrorism*” (Maftuh, 2004: 556).

Pasca tragedi, beragam opini muncul. Sebagian pihak mengklaim bahwa kalangan teroris –khususnya Al-Qaeda- disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas tragedi ini.⁴ Menurut Alwi Shihab (2004: 2), sebuah kanal televisi di Amerika Serikat bernama FOX tak henti-hentinya mengekspos pemberitaan tentang Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Seorang tokoh politik Belanda bernama Pim Fortuyn menegaskan bahwa ia tidak pernah menunjukkan penghinaan terhadap Islam dan umatnya, tapi ia sendiri melihat Islam sebagai agama yang memang sudah hina.

⁴ Kontroversi tentang profil Al-Qaeda pun bermunculan. Apakah benar bahwa Al-Qaeda muncul dari kalangan garis keras di Timur-Tengah? Apakah gerakan Al-Qaeda lahir dengan latarbelakang agama atau semata-mata karena ketersinggungan anak bangsa? Pertanyaan tersebut perlu diungkap karena berkaitan dengan profil Osama bin Laden yang sangat dikenal sebagai pembenci Amerika Serikat nomer wahid yang selalu meneriakkan pembunuhan massal terhadap rakyat Amerika baik sipil atau militer. Mengapa Osama bin Laden berubah pendirian begitu cepat setelah sekian lama menjalin pertemanan dengan Amerika dalam menghabisi *the same enemy*, Uni Soviet? (Maftuh, 2004: 558)

Di pihak lain, muncul pembelaan bahwa Al-Qaeda bukanlah pelaku tindak terorisme. Tragedi tersebut hanyalah bagian dari konspirasi politik Amerika Serikat untuk kepentingan hegemoninya di dunia internasional. George W. Bush dianggap sengaja merancang skenario untuk melakukan ekspansi ke Timur Tengah. Dengan isu tindak terorisme ini dinilai Bush akan mempunyai kesempatan untuk menguasai Timur Tengah.

Tragedi 9/11 merupakan bagian dari rangkaian kisah terkini yang melibatkan dua kubu besar, yaitu Islam dan Barat. Islam direpresentasikan oleh negara-negara Timur-Tengah dan Barat direpresentasikan oleh Amerika Serikat dan para sekutunya, termasuk Israel. Klasifikasi ini hanya untuk memudahkan pembahasan tentang upaya meruntuhkan konflik dua kubu. Dengan demikian, upaya-upaya perbaikan hubungan antara keduanya bisa dikaji secara spesifik.

Membahas tentang konflik Islam dan Barat, berarti membahas dinamika masa lalu keduanya. Hal ini penting agar sejarah bisa dibaca secara komprehensif. Karena hubungan antara Islam dan Barat saat ini sangat berkaitan dengan dinamika masa lalu. Pada tesis ini, peneliti akan menjadikan tragedi 9/11 sebagai titik pancang dinamika hubungan antara Islam dan Barat. Menurut Husaini (2005: 132) tragedi ini menjadi penanda memanasnya hubungan antara Islam dan Barat. Karena tragedi ini pula, perkembangan politik internasional kemudian bergerak menuju tesis benturan peradaban yang dipopulerkan Huntington.

Mengutip dari Huntington, Mukhlas Syarkun dan W. Ghorara (2004: 406) menyebutkan beberapa faktor yang mengakibatkan benturan peradaban antara Islam dan Barat. *Pertama*, pertumbuhan penduduk Muslim yang begitu pesat di satu sisi menyebabkan meledaknya angka pengangguran dan mendorong kalangan anak-anak dan pemuda untuk masuk menjadi anggota kelompok Islamis. *Kedua*, kebangkitan Islam memberikan keyakinan baru di kalangan umat Islam terhadap watak dan keluhuran peradaban serta nilai-nilai yang dimiliki dibandingkan dengan nilai-nilai Barat. *Ketiga*, upaya-upaya Barat yang simultan untuk mempropagandakan nilai-nilai dan institusi-institusi mereka, mempertahankan superioritas kekuatan militer dan ekonomi mereka serta intervensi terhadap dunia Islam, mengakibatkan kebencian di kalangan umat Islam. *Keempat*, runtuhnya komunisme menjadi sebab timbulnya keyakinan akan adanya musuh bersama antara Islam dan Barat dan melupakan masa lalunya. *Kelima*, terjadinya hubungan antara orang-orang Islam dengan orang-orang Barat mendorong munculnya rasa identitas keduanya dan bagaimana membedakan antara yang satu dengan lainnya.

Pada subbab dinamika hubungan antara Islam dan Barat pra tragedi WTC, peneliti mendeskripsikan dinamika pada Perang Salib (*crusades*) dan kontroversi pendirian negara Israel di kawasan Palestina. Peneliti berharap, Dua hal ini efektif untuk mencari korelasi antara pra dan pasca tragedi 9/11.

1. Perang Salib dan Implikasi Politik-Keagamaan

Sejarah mencatat bahwa umat Islam dan Kristen pernah mengukir sejarah panjang bernama Perang Salib.⁵ Terma Perang Salib yang lebih dikenal dengan istilah *Crusade* diambil dari kata *Cross* –yang dalam bahasa Latin disebut *Crux*- merupakan delapan ekspedisi militer yang terjadi sejak abad 11 hingga abad 13 dan melibatkan pasukan Kristen Franks dan pasukan Muslim Saracen (Esposito, 1995: 40).⁶ Dalam buku *A Concise Encyclopedia of Christianity* disebutkan takrif Perang Salib adalah sebagai berikut:

Crusades is pilgrimage to the Holy Land were under taken down the ages, permitted by Arab rulers after the seventh century. But the capture of Jerusalem by the Turks in 1071 led Pope Urban II in 1095 to declare a crusade to regain the Holy Places. The ill-named "Crusades" a use of war which earlier Christians had repudiated, expressed aggression and greed. Only the first Crusade reached Jerusalem, establishing a Latin Kingdom in 1099 which lasted till the muslim Saladin retook the city in 1187. The fourth Crusade turned against the rich eastern christian city of Constantinopel, breaching its walls on good Friday and desecrating the Orthodox Cathedral of Hagia Sophia on Easter Day there was an ill-fated children's Crusade in 1212 and the eight and last led by Louis of France was in 1270 (Geoffrey, 1998: 79).

Jika dirunut ke belakang, hampir 14 abad Islam dan Barat (Kristen) membina hubungan. Hal itu dimulai sejak masa Rasulullah saw. Pada zaman Rasulullah saw, praktis tidak ada polemik serius antara keduanya. Setelah wafat, hubungan keduanya sedikit mengalami keretakan, terlebih

⁵ Perang Salib adalah istilah yang dipakai oleh umat Kristiani. Perang Salib ini menjadi simbol loyalitas umat Kristiani untuk merebut kembali daerah suci bernama Yerusalem dari tangan umat Islam. Perang Salib ini –dalam bahasa umat Islam- dipopulerkan menjadi Perang Sabil atau Sabilillah yang berarti perang di jalan Allah Swt. Jika melihat istilah yang dipakai, keduanya bertemu di titik kulminasi, yaitu perjuangan membela agama Tuhan. Jika umat Kristiani berjuang merebut tanah suci 'yang dirampas' umat Islam, maka umat Islam pun menganggap sedang berjuang untuk mempertahankan tanah suci Umat Islam.

⁶ Dalam perkembangannya, istilah Perang Salib inipun lazim dipakai untuk mengartikan ragam gerakan atau aktifitas yang mengandung arti upaya menentang kejahatan dan kemungkaran. Dengan kata lain, istilah ini dipakai sebagai simbol yang menandai kebaikan.

saat Islam melakukan ekspansi ke beberapa kawasan pendudukan Kristen Byzantium, yaitu Syria (635 M), Yerusalem dan Mesir (640 M). Spanyol yang juga daerah jajahan Kristen Byzantium diserbu pada tahun 710 M dan takluk pada tahun 732 M. Di Timur, India juga jatuh ke tangan pasukan Islam (Shihab, 2004: 43).

Hal ini menjadi salah satu faktor kemarahan umat Kristen. Mereka pun terobsesi untuk merebutnya kembali dari tangan umat Islam. Menurut Watt (1972: 6), ekspansi yang dilakukan umat Islam ini merupakan jihad dan penapaktilasan jejak Muhammad saw sewaktu hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemarahan umat Kristen memuncak kala ibu kota Kristen Byzantium, Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam antara tahun 716-717 M. Gerakan ekspansi umat Islam ini terhitung progresif. Dalam rentang waktu kurang dari 1 abad, besarnya kawasan Islam mencapai lebih dari tiga kali luas kawasan Kerajaan Romawi. Hal itu ditambah dengan ekspansi Islam ke Sisilia, Italia Selatan lebih kurang selama 2 abad (Shihab, 2004: 43).

Kenyataan ini disinyalir menjadi faktor memanasnya suhu politik antara umat Islam dan umat Kristen. Umat Kristen berfikir bagaimana merebut kembali kawasan tersebut dan menghancurkan kekuatan umat Islam. Jika umat Kristen berpandangan bahwa ekspansi umat Islam menjadi bukti kebrutalan yang harus dilawan, umat Islam berpandangan bahwa ekspansi merupakan bagian dari jihad di jalan Allah swt yang dihukumi wajib.

Pecahnya Perang Salib merupakan akumulasi konflik antara Islam dan Kristen pasca ekspansi Islam besar-besaran ke beberapa kawasan Kristen. Terlebih, saat Islam menaklukkan Spanyol lebih kurang selama tujuh setengah abad (Yatim, 2003: 93). Artinya, Perang Salib bukanlah konflik pertama yang menghadapkan antara Islam dan Barat dalam posisi bermusuhan. Ia lebih sebagai perpanjangan konflik-konflik masa lampau. Menurut Bakar (2008: 147), Perang Salib sangat melegenda dibanding lainnya karena mempunyai keterkaitan erat dengan konflik Yerusalem yang masih terus memanas hingga saat ini.

Secara umum, penyebab pecahnya Perang Salib dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu Kebangkitan Kristen Katolik di Eropa Barat dan Krisis Politik Keagamaan di Timur Tengah.

a. Kebangkitan Kristen Katolik di Eropa Barat

Pecahnya Perang Salib tidak lepas dari gerakan kebangkitan Kristen Katolik di Eropa Barat. Pada akhir abad 10 M Gereja Ordo Benedektin Cluny di Burgundi, Perancis mensponsori sebuah reformasi keagamaan di tengah masyarakat Eropa yang dikenal dengan nama Reformasi Cluny. Tujuannya, mengkristenkan seluruh masyarakat Eropa Barat. Menurut Bakar (2008: 149), gerakan reformasi ini didukung oleh Paus dan otoritas Gereja Katolik Roma.

Selain itu, meluasnya kawasan ekspansi Islam juga menjadi ruh lahirnya gerakan Reformasi Cluny.⁷

Menurut beberapa penginjil, meluasnya ekspansi Islam membahayakan eksistensi agama Kristen karena ajaran Yesus Kristus terancam punah dari muka bumi ini. Doktrin ini pada perkembangannya sangat efektif membangkitkan *sense* kekristenan masyarakat Eropa Barat saat itu. Paus dan segenap tokoh agama terus mengobarkan semangat untuk melakukan Ziarah Pertobatan atau Ziarah Suci. Lokasi yang menjadi obyek penziarahan adalah makam St. Petrus di Roma, Maria Magdalena di selatan Perancis, Joseph-Arimathea di Glastonbury serta St. James yang dipercaya sebagai saudara kembar Yesus di Compostela.⁸ Dalam ziarah ini, mereka juga melakukan ritual acara tobat massal. Dari sinilah

⁷ Secara umum, Reformasi Cluny mengajarkan penataan batin, sebagaimana dimiliki rahib, kepada masyarakat Kristen hingga meliputi persoalan seks. Senggama dilarang ketika masa Adven, pra-Paskah, menstruasi, hamil, menyusui bayi, serta hari-hari suci seperti Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Hidup kerahiban adalah hidup monastikisme, yaitu membujang sebagaimana yang dilakukan Yesus di muka bumi. Selain itu, mereka juga harus hidup sederhana dan tidak menggemari kenikmatan keduniawian. Anjuran ini berlangsung sebagai usaha memaknai kehidupan mereka yang saat itu serba miskin, penuh derita dan dirundung kesedihan meskipun pada saat bersamaan para pendeta justru hidup serba kecukupan dan hidup mewah. Suatu cara paling populer dalam meneladani monastikisme, sebagaimana diajarkan Cluny adalah dengan mengadakan Ziarah Pertobatan (Bakar, 2008: 150).

⁸ Tempat-tempat tersebut menjadi obyek Ziarah Pertobatan ini meskipun di sisi lain mereka meyakini bahwa tempat-tempat tersebut belum bisa menandingi kesucian Yerusalem; tempat Yesus dimakamkan pasca disalib. Tempat itu semakin sakral karena diyakini mengandung kekuatan Tuhan. Dalam keyakinan Kristen, Yerusalem sejatinya Kota Suci yang diperuntukkan untuk umat Kristiani, bukan umat Islam. Jadi, jika umat Kristen ‘merampas’ dari tangan umat Islam, itu semata-mata mengambil haknya. Tidak hanya umat Islam, kaum Kristen juga beranggapan bahwa Yahudi pun tidak berhak mengklaim Yerusalem sebagai Tanah Suci bagi mereka (Bakar, 2008: 151).

muncul Mitologi-Apokalipstik⁹ yang meyakini bahwa dunia akan mengalami kehancuran akibat gerakan-gerakan ideologis yang dilakukan umat Anti-Kristus. Maka –menurut mereka- salah satu cara untuk menyelamatkan dunia adalah melawan Anti-Kristus di tanah suci Yerusalem (Bakar, 2008: 152). Mitologi-Apokalipstik ini pada perkembangannya menjadi pembangkit semangat bagi umat Kristen untuk melakukan perjuangan melawan umat Islam, khususnya yang berada di Spanyol, Italia, Sisilia, dan Mediteranian.

Di samping ziarah dan tobat massal, pengaduan Alexius I, Raja Byzantium kepada Paus perihal ancaman Islam yang akan menguasai wilayah Asia dan Ibu Kota Kerajaan menjadi pembangkit pecahnya perang. Paus pun menyerukan Perang Suci (*Holy War*). Menurut Esposito (1995: 40-41), pada konteks ini, Perang Salib diilhami dua hal, yaitu melakukan ziarah suci dan perebutan hak atas kepemilikan Kota Suci Yerusalem.¹⁰ Selain itu,

⁹ Berawal dari Mitologi-Apokalipstik inilah lahirnya semangat untuk menguasai Yerusalem dan menenyapkan semua umat Anti-Kristus yang ada di sana. Kesakralan Yerusalem di hati para umat Kristiani pun semakin mengkristal. Mereka mempersiapkan diri untuk turut serta dalam “Perang Suci” (*Holy War*) yang kemudian populer dengan nama Perang Salib (*Crusade*) yang sangat melegenda. Mereka hanya menunggu waktu saja karena meskipun kondisi Timur-Tengah sedang labil, namun umat Kristiani harus merampungkan urusan internalnya dimana Gereja Ortodoks Timur masih bersitegang dengan Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel.

¹⁰ Yerusalem memiliki magnet yang luar biasa bagi tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, ketiga agama ini pernah terlibat polemik perihal status Kota Suci Yerusalem. Umat Islam mengklaim Yerusalem sebagai tempat suci karena pernah disinggahi Nabi Muhammad saw dalam rangkaian perjalanan Isra’ dan Mi’raj. Umat Kristen mensakralkan tempat itu karena disanalah Yesus dimakamkan. Sementara umat Yahudi mengklaim bahwa Yerusalem adalah negeri asal nenek moyang Yahudi dan tempat itu –disinyalir- menjadi kawasan yang dijanjikan Tuhan (*Promised Land*) untuk mereka tempati. Premis-premis inilah yang menyebabkan masing-masing penganut tiga agama besar tersebut mempertahankan keberpihakannya terhadap Yerusalem. Tak ayal, sentimen antar kelompok pun terjadi, misalnya kaum Kristen menyebut kaum Yahudi sebagai *Christ-Killers* dan klaim Yahudi atas kepemilikan

Perang Salib dinilai sebagai bentuk kecintaan kepada Tuhan (*to slay for God's love*). Nilai-nilai ini efektif membangkitkan semangat perang demi Yerusalem (Daniel, 1960: 109).

b. Krisis Politik Keagamaan di Timur-Tengah

Rapuhnya politik-keagamaan di Timur-Tengah ini merupakan akibat dari polemik internal yang terjadi antara beberapa kerajaan Islam. Memasuki pertengahan abad XI, muslim Timur-Tengah mengalami masa kemunduran, terutama di bidang politik-keagamaan. Sejak tahun 485 H / 1092 M, terjadi rentetan pembersihan para tokoh politik. Pada tahun ini, tokoh terbesar dalam sejarah Saljuk, Nizham al-Mulk sebagai penguasa *de facto* kekaisaran Saljuk beserta keluarganya dibunuh. Tahun ini pun disebut dengan Tahun Bencana. Kondisi lain yang menandai rapuhnya kekuatan umat Islam di Timur-Tengah adalah wafatnya Khalifah Fatimiyah di Mesir, al-Mustanshir yang telah memerintah selama lebih dari 58 tahun. Khalifah Abbasiyah yang berhaluan sunni juga wafat (1487 H / 1094 M). Kondisi ini turut memperlemah stabilitas politik umat Islam di Timur-Tengah (Hillenbrand, 2005: 43).

Yerusalem dianggap tidak berdasar. Namun dalam perkembangannya, Yahudi melunak dan memilih berkompromi dengan Kristen untuk menjalin kerjasama merebut Yerusalem dari tangan umat Islam (Armour, 2002: 64). Yahudi mempunyai kalkulasi politis bahwa umat Kristen lebih kompromistis dalam masalah Yerusalem dibandingkan dengan umat Islam.

Pertikaian juga terjadi antara Dinasti Fatimiyah-Syiah dan Dinasti Turki-Saljuk-Sunni untuk memperebutkan Syria dan Palestina. Kekuatan Dinasti Fatimiyah di Mesir melemah akibat dilanda perang perebutan kekuasaan di antara putera Khalifah al-Mustanshir. Demikian pula Turki-Saljuk. Kesultanan menjadi terpecah-pecah dan melahirkan kerajaan-kerajaan kecil semi merdeka di Irak, Iran, Palestina, Syrian dan Asia Kecil. Sebelumnya, Dinasti Saljuk sempat berhasil membangun peradaban megah di Irak terutama di bawah kepemimpinan Alp Arslan. Hal itu ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di Madrasah Nizamiyah.

Pada masa Alp Arslan, Kekaisaran Romawi di Konstantinopel mengalami kemunduran akibat kekalahan yang bertubi-tubi di hadapan barisan tentara Turki ketika hendak merebut Asia Kecil. Namun demikian, Alp Arslan lebih bersemangat menghancurkan kebesaran Dinasti Fatimiyah. Para pangeran dan panglima militer Saljuk yang menguasai sejumlah negara kota yang dipusatkan di tempat-tempat seperti Aleppo, Damaskus, dan Mosul pada peralihan abad kesebelas bahkan terlibat perang saudara. Keadaan ini memperlemah stabilitas politik dinasti-dinasti Islam saat itu. Kekuatan asing pun datang menyerang. Kaum Frank merebut dan membentengi pelabuhan-pelabuhan Suriah dan berlanjut dengan membentuk empat negara Salib di wilayah tersebut, yaitu

Yerusalem, Edessa, Antiokhia dan Tripoli (Hillenbrand, 2005: 60-61).

Keadaan ini pula yang menjadikan Pasukan Salib bersemangat memulai serangan untuk merebut Yerusalem yang selama ini diambil alih umat Islam. Dalam pandangan mereka, Yerusalem adalah Kota Suci Yesus. Dalam Injil, kata Yerusalem disebutkan sebanyak 812 kali. Contoh ayat yang dijadikan sebagai pijakan Pasukan Salib adalah sebagai berikut :

2 Chronicles 6 : 6 But I have chosen Jerusalem that my name might be there and have chosen David to be over my people Israel.

Zechariah 1 : 17 ...and the lord shall yet comfort Zion and shall yet choose Jerusalem

Smith (2003: 63) menilai ayat tersebut menjadi spirit bagi Pasukan Salib dalam merebut kembali kota Yerusalem.

Selain dua hal tersebut, ambisi untuk mendapatkan harta rampasan perang disinyalir menjadi salah satu stimulus untuk mengangkat senjata melawan pasukan muslim. Nilai toleransi antar umat beragama yang selama ini diajarkan Injil, justru tidak tampak. Menurut Brundage (2002: 114) keadaan ekonomi memberikan pengaruh secara langsung terhadap motivasi yang terbangun dalam diri mereka.

c. **Dinamika Perang Salib dalam Rentang Sejarah**

Perang Salib merupakan ekspedisi suci yang dilakukan oleh umat Kristiani untuk merebut tanah suci Yerusalem dari tangan umat Islam. Perang Salib ini pecah dalam beberapa tahap dengan setting dan obyek yang berbeda. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Perang Salib Pertama terjadi pada tahun 1097 M. Namun, Toyenbee (1954: 242) berpendapat bahwa Perang Salib yang selama ini dikenal sebagai Perang Salib fase pertama sebenarnya sudah memasuki fase kedua.

Pada tahun 1018 M tepatnya pada masa Reconquista atau pembebasan kembali negara Spanyol, kaum Kristen Eropa Barat sudah terlibat polemik dengan umat Islam. Dalam polemik tersebut, Perancis mengirim pasukan untuk menahan serangan umat Islam. Inilah Perang Salib fase pertama.

Pada 17 November 1095 Paus Urbanus II mengeluarkan maklumat penting tentang urgensi perang suci melawan umat Islam. Kepada 150.000 sukarelawan, Paus menyerukan untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan umat Islam (Bakar, 2008: 162-171). Pada waktu memasuki Yerusalem, mereka mendapatkan perlawanan dari Dinasti Fatimiyah. Jumlah yang tidak berimbang membuat Pasukan Salib memenangkan pertempuran. Pasukan Salib semakin mengukuhkan kemenangan dengan membangun tiga Kerajaan Salib, yaitu Edesa, Antiokia dan Yerusalem. Kondisi

politik umat Islam yang sedang melemah, membuat Pasukan Salib terus melakukan ekspansi. Namun ekspansi mereka terhenti di kawasan-kawasan pedalaman seperti di Aleppo, Hamah, Hims, Baklabak dan Damaskus. Kota-kota ini memilih untuk membuat kesepakatan damai dengan Pasukan Salib (Bakar, 2008: 162-171).

Setelah mengalami keterpurukan di Perang Salib I, pada fase berikutnya Islam bangkit di bawah Zanki, seorang pendiri Dinasti Zanki dan putranya, Nuruddin. Pada masa Nuruddin, Pasukan Salib berhasil menjalin komunikasi politik dengan Abu Syuja Syawar bin Muhir, seorang menteri Dinasti Fatimiyah pada masa Khalifah al-Adid guna memperkokoh posisinya. Meskipun Nuruddin berhasil mengalahkan pasukan koalisi ini, namun ia belum berhasil merebut Yerusalem.

Sepeninggal Al-Adid dari Dinasti Fatimiyah, Salahudin mengambil alih kekuasaan dengan membubarkan Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah dan menggantinya dengan Kesultanan Islam Sunni. Setelah memegang tampuk kekuasaan, program utama Salahudin adalah membebaskan Yerusalem. Pada hari Jum'at, 2 Oktober 1187 M bertepatan dengan peringatan Isra' Mi'raj, Salahudin berhasil merebut Yerusalem. Ia pun segera melakukan reformasi di kota suci ini dan menciptakan perdamaian dengan mewujudkan kerukunan umat beragama antara umat Islam dan umat Kristen.

Selang dua puluh hari kemudian, terjadi Perang Salib Ketiga. Paus Gregorius VIII di Eropa menyerukan agar umat Kristen mengubah strategi untuk merebut Yerusalem. Seruan Paus ini direspon oleh Kaisar Jerman, Frederick Barbarossa, Raja Jerman, Richard I Coeur de Lion dan Raja Perancis, Philip Augustus. Seruan ini memberikan implikasi positif terhadap hubungan antara ketiganya yang sebelumnya dilanda krisis.

Pada fase ini Salahudin dan Richard menjalin hubungan yang baik. Keduanya membuat kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Jaffa. Isinya, *pertama*, kedua belah pihak melakukan gencatan senjata selama lima tahun. *Kedua*, Salahudin berjanji untuk tidak menyerang dan mengusir bangsa Eropa. *Ketiga*, Richard berjanji untuk tidak menyerang Yerusalem. *Keempat*, Pasukan Salib berkuasa di sepanjang pantai Jaffa hingga Beirut dan kota Acre menjadi pusat pemerintahan kerajaan mereka. *Kelima*, penduduk muslim dan kristiani harus saling menghormati.

Paus Innocentius III kurang senang dengan kedekatan Richard. Ia dituduh telah menodai misi Perang Salib. Paus pun memaklumkan kepada bangsa Eropa-Kristen untuk memulai kembali Perang Salib Keempat (1198 M). Namun, maklumat ini kurang mendapatkan respon dari umat Kristen di Eropa. Meskipun demikian, beberapa pihak seperti Boniface dari Montferrat dan Philip, anak Frederick Barbarossa memanfaatkan fenomena ini

untuk mempropagandakan Perang Salib. Boniface berutang kepada Erico Dandolo dari Venesia untuk memberangkatkan pasukannya ke Yerusalem. Selain itu Boniface juga membuat kesepakatan dengan Sultan Al-Adil di Kairo-Mesir.

Masalah muncul ketika Boniface tidak bisa melunasi hutangnya kepada Erico. Erico kemudian memberikan opsi pembebasan hutang, yaitu pengambilalihan kekuasaan Pasukan Salib. Setelah diambil alih oleh Erico, Pasukan Salib dikerahkan bukan untuk merebut Yerusalem, tapi untuk ke Yugoslavia guna merebut Kristen Ortodoks. Philip memanfaatkan kekuatan Pasukan Salib untuk menduduki Konstantinopel guna mengembalikan tahta Kaisar Isaac, saudara Philip. Namun yang terjadi, Pasukan Salib justru melakukan serangkaian kekacauan di Konstantinopel.

Pada saat yang sama, di Mesir dan Syria terjadi kekacauan akibat persaingan dan perang saudara dalam keluarga Salahudin. Pertikaian itupun dimenangkan oleh Al-Adil. Karena takut melakukan kontak fisik dengan Pasukan Salib di Acre, Al-Adil mengizinkan mereka menduduki Iskandariah. Satu persatu daerah kekuasaan hasil perjuangan Salahudin seperti Beirut, Safawi, Tiberias dan Askalon jatuh ke tangan Pasukan Salib.

Pasukan Salib tetap terobsesi untuk merebut kembali kota Yerusalem dari tangan umat Islam. Seruan Paus Innocentius III untuk melakukan Perang Salib direspon dingin umat Kristiani.

Salah satu faktornya, banyak umat Kristen yang membina hubungan baik dengan umat Islam, misalnya kerjasama di bidang perdagangan. Bahkan, tidak sedikit mereka yang mencintai gadis muslimah.

Pada saat yang sama, terjadi perpecahan antara Sultan Al-Kamil dan Mu'azzam - saudara Al-Kamil yang berada di Syria. Al-Kamil menggalang bantuan dengan melakukan pendekatan kepada Frederick. Persoalan mulai muncul. Sebagai kompensasi atas bantuan kekuatan yang diberikan Frederick, Sultan Al-Kamil menyerahkan Yerusalem kepada Frederick. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1229 M. Hubungan antara Al-Kamil dan Frederick pun semakin dekat.

Setelah Al-Kamil mangkat, perseteruan antara Mesir dan Syria yang diwarisi oleh Mu'azzam dan Al-Kamil terus menegang. Pada tahun 1239 M Yerusalem jatuh ke tangan Nashir Daud di Kerak, dari keluarga Dinasti Ayubiyah. Akibat perseteruan yang berkepanjangan dengan Al-Malik Al-Shalih Najmudin, Nashir Daud menyerahkan Yerusalem kepada Pasukan Salib sebagai imbalan atas bantuannya dalam melawan Al-Malik Al-Shalih. Melihat keadaan ini, Najmudin geram dan meminta bantuan kepada muslim Turki-Khawarizmi yang merupakan pengungsi akibat serangan brutal Bangsa Mongol. Koalisi antara Najmudin dan Turki-Khawarizmi kemudian mampu memukul mundur pasukan

Syria dan Pasukan Salib. Mereka kemudian berhasil menduduki Syria dan Palestina.

Raja Louis VII dari Perancis bangkit dan hendak memimpin konvoi Pasukan Salib Ketujuh. Setelah gagal menjalin koalisi dengan bangsa Mongol untuk menghadapi Najmudin di Mesir, bersama pasukannya, Raja Louis membulatkan tekad untuk berangkat ke Mesir. Mereka berhasil menduduki daerah Dimyat dan kemudian hendak melakukan ekspansi ke kota Mansurah.

Melihat situasi ini, Baibars yang menjadi tangan kanan Najmudin muncul sebagai pahlawan. Dengan kelihaiannya memimpin sejumlah pasukan muslim, Baibars berhasil menghancurkan kekuatan Louis. Bahkan Louis menjadi tawanan perang. Pada saat yang sama, detasemen pasukan Mesir berkebangsaan Turki yang pernah dibentuk pada masa Najmudin mengambil alih kekuasaan. Detasemen inilah yang disebut dengan Mamluk.

Setelah Perang Salib Ketujuh berakhir dengan kekalahan Pasukan Salib, berikutnya Pasukan Muslim menghadapi musuh baru, yaitu bangsa Mongol. Pada tahun 1257 M, Hulagu membawa tentara Mongol bergerak menuju ibu kota Kekhalifahan Islam Sunni di Bagdad. Tentara Mongol dikenal bengis dan kejam. Mereka selalu membunuh muslim dimanapun mereka jumpai. Dalam waktu sekejap, praktis kota Bagdad pun bak kota mati yang dipenuhi oleh

bangkai muslim. Pada tahun 1260 M, Mongol membuat ratusan ribu muslim menjadi bangkai. Mereka berhasil menduduki Aleppo, Damaskus, dan beberapa kota di Palestina. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil menduduki Irak dan Syria.

Ibarat pertunjukan, Raja Louis VII begitu seksama menyimak adegan demi adegan yang berlangsung antara kubu Baibars dan kubu bangsa Mongol. Bak memancing di air keruh. Namun demikian, Sultan Baibars berhasil menghadapi himpitan ini. Sadar bahwa kaum Kristen ingin menghancurkan Dinasti Mamluk, pada tahun 1287 M, Ilkhan Mongol menawarkan sebuah koalisi dengan Paus di Eropa untuk bekerjasama menghancurkan kekuatan Dinasti Mamluk. Koalisi ini juga mendapatkan sambutan hangat dari Kristen Tripoli. Mereka merencanakan penyerangan demi menghancurkan Dinasti Mamluk dan sekaligus merebut Yerusalem.

Setelah merekam episode demi episode Perang Salib, peneliti melihat hubungan umat Islam dan umat Kristiani begitu dinamis. Masing-masing pihak, baik Islam maupun Kristen mempunyai prinsip dan keyakinan yang sulit disatukan. Pasukan Salib merasa bahwa perang yang dilakukan adalah upaya untuk merebut Kota Suci miliknya sebagaimana disebutkan dalam Injil. Sementara di pihak muslim, perjuangan mereka semata-mata mempertahankan Kota Suci Yerusalem dari rongrongan Pasukan Salib. Implikasinya

juga sangat besar. Perang Salib menjadi mimpi buruk bagi kedua agama (Armour, 2002: 180-181).

Setelah menyimak pasang surut pecahnya Perang Salib yang berlangsung lebih dari 4 abad tersebut, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan, yaitu:

- a. Perang Salib dipengaruhi oleh faktor politik-keagamaan dan ekonomi. Pasukan Salib mengartikan perjuangan ini sebagai Perang Suci (*Holy War*) untuk merebut Yerusalem dari tangan umat Islam. Kondisi krisis yang melanda warga Eropa disinyalir menjadi faktor lain bangkitnya Pasukan Salib untuk merebut Yerusalem.
- b. Hubungan Islam dan Barat pada masa Perang Salib mengalami pasang surut. Pada satu masa, mereka bisa menjalin pertemanan dan pada masa yang lain, mereka terlibat permusuhan yang sengit. Persahabatan antara keduanya ditunjukkan oleh Salahudin – Richard dan Frederick - Al-Kamil. Sikap simpatik juga ditunjukkan Frederick kala menegur seorang muadzin yang melantunkan adzan dengan suara lirih. Frederick menyayangkan jika dengan suara merdunya, ia beradzan hanya dengan suara lirih.
- c. Antara Islam dan Barat acapkali terjadi kompromi politik yang berimplikasi positif dan negatif. Implikasi positif sebagaimana ditunjukkan Salahudin dan Richard. Kompromi keduanya tetap

langgeng dan berakhir dengan genjatan senjata. Sementara implikasi negatif bisa dilihat dalam romantisme yang terjalin antara Frederick dan Al-Kamil. Al-Kamil harus menyerahkan Yerusalem kepada Pasukan Salib. Selain itu, kompromi atau komunikasi politik seringkali dijadikan sebagai alternatif untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih besar. Hal ini sebagaimana terjadi dalam lobi politik Al-Adil kepada Pasukan Salib ketika hendak memasuki kawasan Alexandria.

Banyak hal yang bisa disimak dari Perang Salib yang terjadi hampir 4 abad itu. Ada persahabatan dan permusuhan, ada konfrontasi dan kerjasama, kebencian dan percintaan. Fluktuasi hubungan antara Islam dan Barat sebagaimana diukir dalam Perang Salib ini memberikan implikasi besar terhadap dinamika hubungan antara Islam dan Barat dalam konteks sejarah kontemporer (Armour, 2002: 180-181). Menurut Husaini (2005: xxii), selama konfrontasi fisik berlangsung ratusan tahun, antara pasukan Muslim dan Kristen, telah terjadi interaksi sosial-budaya yang cukup intensif. Antara peradaban akan selalu terjadi interaksi, saling memberi dan menerima. Antara Turki Utsmani dengan negara-negara Barat ketika itu juga terjadi hubungan diplomatik.

2. Kontroversi Berdirinya Negara Israel dan Pengaruhnya terhadap Konstelasi Politik Global

Palestina negara yang diagungkan tiga agama (Islam, Kristen dan Yahudi).¹¹ Di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa yang terletak di Bukit Muriah, Yerusalem. Menurut Dockser (2007: 24) sudah sejak lama mereka hidup berdampingan, baik dalam persahabatan maupun pertikaian. Dan Yerusalem, menjadi salah satu faktor munculnya pertikaian antara ketiganya.

Pada bahasan terdahulu, peneliti telah mendeskripsikan kronologi Perang Salib. Pada bahasan ini, peneliti menelaah lebih dalam tentang pendirian Negara Israel yang dikenal kontroversial. Kontroversi inilah yang menyebabkan ketegangan antara Israel dan Palestina, hingga sekarang. Menelaah tentang konflik Israel-Palestina, berarti menelaah kronologi berdirinya Israel di Palestina. Hal ini memiliki kemiripan dengan Perang Salib dimana kedua belah pihak mengklaim kepemilikan kawasan Palestina sebagai Kota Suci.

¹¹ Umat Islam berkeyakinan bahwa Yerusalem adalah kota suci umat Islam karena disanalah Nabi Muhammad saw singgah dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Di pihak lain, umat Kristiani mengklaim bahwa Yerusalem adalah kota suci umat Kristiani dimana Yesus dimakamkan pasca disalib. Di sana pula Yesus turun untuk membuat kerajaan Tuhan untuk memusnahkan kelompok Anti-Kristus. Bukan hanya Islam dan Kristen yang berpolemik tentang kepemilikan Palestina, melainkan Yahudi juga merasa berhak memiliki kawasan tersebut. Yahudi beranggapan bahwa Palestina –termasuk Yerusalem- adalah pulau yang dijanjikan (*Promised Land*) bagi kaum Yahudi meskipun beberapa literatur menyebutkan ada tanah lain yang juga disinyalir menjadi *Promised Land*, yaitu tanah Nubia yang terletak di dekat perbatasan antara Mesir dan Sudan.

Pada tesis ini tidak dibahas tentang latar belakang bangsa Israel.¹² Peneliti memfokuskan kajian pada implikasi politik, ekonomi dan agama yang terjadi dalam rentang pendirian negara Israel. Implikasi-implikasi tersebut akan menjadi bahan kajian peneliti untuk mencari titik kulminasi antara kontroversi pendirian negara Israel dengan kebijakan luar negeri Barack Obama.

Disebutkan dalam sejarah bahwa pada tahun 1600 SM, keluarga Nabi Ya'kub as pindah ke Mesir. Perpindahan ini sering disebut sebagai gerakan pertama bangsa Israel. Sepeninggal Nabi Ya'kub as, anak keturunannya hidup dari sebidang area yang dihadiahkan Nabi Yusuf as. Mereka mulai membangun hegemoni di Mesir. Hegemoni tersebut pelan-pelan merapuh seiring meninggalnya Nabi Yusuf as. Dalam perkembangannya, bangsa Israel mulai terlibat konflik politik internal Mesir, yaitu ketika mereka memberikan dukungan terhadap Amaliqoh Heksos Babilonia yang sedang berseteru dengan Mesir. Ketegangan ini mencapai klimaks saat Mesir dibawah kekuasaan Ramses II. Karena termarginalkan dan sering dirundung masalah, mereka pun kembali ke Palestina.

¹² Bangsa Israel merupakan cabang rumpun keluarga Semit. Rumpun lain keluarga Semit adalah bangsa Babilonia, Abissinia, Kaldea, Assiria, Aramia, Phoenesia dan Arab. Semit adalah saudara dari Ham, leluhur bangsa-bangsa Afrika yang juga bersaudara dengan Yephet, anak tertua Nabi Nuh as yang menjadi leluhur bangsa Eropa. Para ahli sejarah juga bersepakat bahwa bangsa Israel disebut juga dengan bangsa Ibrani. Ibrani berasal dari bahasa Arab *'abara* yang berarti melakukan perjalanan melalui lembah atau sungai. Kata *'abara* juga berarti aktifitas berpindah-pindah (nomaden) dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata ini relevan disematkan kepada bangsa Israel yang sebelum menetap di Kan'an, mereka hidup mengembara dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

Ketika di Palestina, mereka sering terlibat pertikaian dengan penduduk setempat. Pertumpahan darah pun terjadi. Akhirnya keturunan bangsa Israel semakin habis.¹³ Karena sikapnya yang arogan, banyak pihak bermaksud untuk menghabisi keturunan bangsa Israel. Bahkan, beberapa pihak menentang keras upaya pendirian negara Israel. Menurut filosof dan ekonom Jerman, Eugen Karl Duhring, untuk mencampakkan impian Israel membangun sebuah negara harus dimulai dari pembunuhan dan pengusiran (Johnson, 1987: 394).

Setelah berabad-abad mereka dirundung konflik dan hidup dalam ketidakpastian, muncullah ide mendirikan negara yang berdaulat. Tema Zionisme pun mulai diusung.¹⁴ Zionisme menjadi alat untuk mendirikan negara Israel yang berdaulat di kawasan Palestina. Terbentuknya Zionisme harus melalui proses panjang dan berliku. Sejak membaca opini yang dikembangkan oleh Eugen Karl Duhring, Theodore Herzl sebagai penggagas Zionisme terus mencari cara untuk mewujudkan berdirinya negara Yahudi yang berdaulat (Armour, 2002: 150).¹⁵ Herzl

¹³ Beberapa ahli mengatakan bahwa Israel adalah bangsa yang eksklusif, sombong dan suka meremehkan pihak lain. Hal ini membuat beberapa negara merasa benci negara pun tidak menginginkan Israel ada.

¹⁴ Zionisme adalah sebagai sebuah ideologi mengalami perkembangan dan bentuk nyata pada abad ke-19 M di Eropa. Theodore Herzl (1860-1904) merupakan tokoh utama penggagas dan perumus gerakan Zionisme. Hal ini lahir sebagai pengaruh tidak langsung dari munculnya semangat nasionalisme di tengah bangsa Eropa. Dalam setiap pidatonya ia selalu mengatakan, "Kami akan berusaha sekuat tenaga mengusir orang-orang Arab ke negeri tetangga dan akan menutup pintu masuk dan pekerjaan bagi mereka di negeri kami ini. Kamu sekalian tidak akan menemukan kebahagiaan bila masih ada penduduk selain Yahudi di tanah Palestina".

¹⁵ Theodore Herzl merupakan arsitek munculnya ide pendirian negara-bangsa bagi Yahudi Diaspora. Sebelum munculnya ide tersebut, di Rusia telah berlangsung gerakan Progom yang melibatkan seorang Yahudi dalam aksi gerakan revolusioner dan memicu terjadinya aksi

yang berprofesi sebagai jurnalis tidak mau setengah hati dalam mewujudkan rencana besarnya ini. Kongres Zionis I di Basel tahun 1897 memutuskan bahwa Zionisme dibentuk sebagai alat untuk mendirikan negara berdaulat di Palestina. Sebagai tindak lanjut, Herzl berkunjung ke Yerusalem untuk merancang strategi pembentukan negara Isarel (Tuchman, 1984: 231).

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Kongres Zionis di Basel, Herzl melakukan kunjungan ke Palestina. Ia mulai melakukan konsolidasi secara persuasif untuk membaca peta politik terkait dengan rencana pendirian negara Yahudi.¹⁶ Banyak perubahan yang terjadi saat Herzl berada di Yerusalem, terutama pada aspek perdagangan. Banyak barang-barang yang diimpor ke Yerusalem, misalnya jeruk dari Jaffa, jubah dari Bettelhem dan sebagainya.

Tahun 1839-1876 Herzl melakukan terobosan yang dikenal dengan nama Tanzimat. Dengan terobosan ini, Herzl semakin mempunyai pengaruh kuat di Yerusalem hingga pemerintahan Turki Utsmani tidak

pembunuhan Tsar Alexander II di tahun 1881 M. Kesalahan satu orang Yahudi tersebut tanpa diduga menyulut amarah Rusia kepada bangsa Israel. Mereka diusir dari Rusia. Pasca insiden, sebagian melarikan diri ke Eropa Barat dan Amerika, dan sebagian yang lain memilih pindah ke Palestina. Dengan keadaan ini, Herzl mengurungkan diri untuk mencari dukungan di Rusia. Kehadiran mereka di Eropa Barat juga kurang mendapatkan sambutan. Puncaknya adalah munculnya gerakan anti-Semit (Anti-Yahudi) yang mengakibatkan terjadinya pembantaian kaum Yahudi yang dikenal dengan Holocaust (Bakar, 2008: 227).

¹⁶ Dua tahun sebelum Herzl mengunjungi Palestina, Yahudi menjadi penduduk mayoritas di Yerusalem dengan total 28.110 orang. Penduduk Kristen berjumlah 8.750 orang dan Islam berjumlah 8.560 orang. Namun, kuasa perpolitikan dipegang kaum muslim seiring dengan pendudukan Turki Utsmani. Turki Utsmani mempunyai kebijakan bahwa status penduduk Yahudi dan Kristen dianggap sebagai turis (*foreign passport*). Jadi mereka belum diakui sebagai penduduk Yerusalem (Dockser, 2007: 41).

bisa mengendalikannya. Paradigma sosial-kemasyarakatan bergeser. Masyarakat Kristen semakin bebas menyebarkan ajarannya dan warga asing bisa dengan bebas membeli properti dan mendirikan permukiman baru. Keadaan semakin tidak terkontrol. Klimaksnya, pemerintah Turki Utsmani mengakui kota Yerusalem terbagi menjadi beberapa bagian setelah lebih kurang selama 300 tahun berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani (Dockser, 2007: 42).

Inilah Yahudi. Mereka mempunyai strategi dan kemampuan komunikasi politik yang sistematis. Tidak mengherankan jika pihak muslim merasa khawatir dengan kekuatan Yahudi. Bahkan, jauh sebelum Herzl melakukan kunjungan ke Palestina, negara-negara Arab sudah mewaspadaai masuknya Yahudi ke kawasan mereka. Bagaimana Herzl bisa masuk ke kawasan Palestina? Disebutkan bahwa dalam pemerintahan Turki Utsmani terdapat beberapa unsur Yahudi. Ini menjadi faktor keberhasilan Herzl masuk ke kawasan Palestina (Dockser, 2007: 43).

Ketika merintis ide Zionisme sebagai alat untuk mendirikan negara Yahudi, menurut Rollin (2002: 152), Herzl dan para *founding fathers* menghadapi problem finansial dan dukungan politik. Dalam situasi ini Inggris menyatakan kesediaannya menjadi partner Zionis. Bahkan di saat Herzl belum mendapatkan kepastian tentang kemungkinan pendirian

negara Yahudi di Palestina,¹⁷ Inggris menawarkan lokasi di Afrika Timur sebagai alternatif lain. Namun saat ide ini disampaikan dalam Kongres Zionis, mayoritas anggota menolak. Salah satu tokoh yang lantang menolak ide tersebut adalah Victor Jacobson yang nantinya menjadi otak berdirinya Zionis setelah *Young Turk* menguasai Konstantinopel (Dockser, 2007: 49).

Pada tahun 1898, Yusuf Khalidi menjabat sebagai Walikota Yerusalem. Yusuf Khalidi dan keponakannya, Ruhi Khalidi membujuk Herzl agar mencari tempat alternatif lain untuk pendirian negara Yahudi. Belum sampai Herzl menanggapi permintaan Yusuf dan Ruhi, Herzl kembali ke negaranya, Viena. Pada kesempatan itu, Yusuf Khalidi berkirim surat kepada Herzl. Isi surat itu masih berkaitan dengan permintaannya kepada Herzl untuk mencari alternatif lain selain kawasan Yerusalem (Dockser, 2007: 46-47). Herzl menegaskan, Yusuf Khalidi tidak perlu khawatir dengan rencana pendirian negara Yahudi

¹⁷ Bangsa Israel mempunyai landasan ideologis berupa Taurat. Dari tinjauan akidah muslim, kitab Taurat –yang dalam tradisi agama Kristen dikenal sebagai Kitab Perjanjian Lama- harus diimani sebagai firman Allah pada Nabi Musa. Namun pada perkembangannya, kitab Taurat-Yahudi sekarang ini penuh kedustaan. Bahkan sekedar mencerminkan pikiran para rabi masa lalu. Tentang klaim Palestina, dalam al-Qur'an tidak terdapat teks janji Allah untuk memberikan kepada keturunan Nabi Ibrahim tanah Palestina. Allah telah berfirman kepada nabi Musa agar menyelamatkan bangsa Israel, memerintahkan kepada mereka lari dari Mesir menuju Palestina. Berdasarkan firman ini, berarti bangsa Israel diperkenankan untuk mendiami Palestina, tapi sejauh mereka masih dalam ketaatan. Kenyataannya justru mereka berdusta (Bakar 2008). Mengomentari penjelasan dalam Kitab Kejadian 15: 18, Dewey Beegle, seorang doktor dari Wesley Theological Seminary, mengatakan, "*Bangsa Israel kuno telah gagal mematuhi perintah Tuhan sehingga mereka telah kehilangan janji atas tanah Palestina.*"

karena Yahudi berjanji akan menciptakan perdamaian di Timur-Tengah.

Dalam suratnya Herzl menulis:

“Do you believe that an Arab who owns land in Palestine, or a house worth three or four thousand francs, will be sorry to see their value rise five-and ten-fold? But this would most certainly happen with the coming of the Jews. And this is what one must bring the natives to comprehend. If one looks at the matter from this viewpoint, and it is the right viewpoint, one inevitably becomes a friend of Zionism” (Dockser, 2007: 47).

Dalam hubungan jarak jauh ini, Herzl dan Yusuf Khalidi terlibat komunikasi politik terkait masa depan pendirian negara Israel di kawasan Palestina. Di Viena, Herzl menulis sebuah novel futuristik-imajinatif yang berjudul *Old-New Land*. Dalam novel tersebut, Herzl mengungkapkan ketidakpuasannya atas komunikasi politiknya dengan Yusuf Khalidi. Novel imajiner itu berisi rencana Herzl terhadap masa depan Palestina. Dalam novel tersebut, tokoh Reschid Bey berperan sebagai Yusuf Khalidi. Hanya saja, Reschid Bey diceritakan sebagai Walikota Yerusalem yang menyambut gembira rencana pendirian negara Yahudi di Palestina karena negara tersebut akan menciptakan stabilitas politik di Palestina. Selain itu, negara ini berpotensi meningkatkan kualitas perdagangan di Palestina, terutama di Yerusalem. Pertimbangan inilah –sebagaimana diceritakan novel imajiner tersebut- yang membuat Reschid Bey mendukung penuh berdirinya negara Israel di Yahudi. Inilah mimpi besar Herzl. Ia dikenal sebagai tokoh pragmatis. Dengan cara apapun Herzl tetap berkeinginan mewujudkan berdirinya negara Yahudi.

Dalam konteks ini, Kesultanan Turki Utsmani pernah memberikan opsi kepada Herzl bahwa pihaknya memperbolehkan warga Yahudi melakukan imigrasi ke Yerusalem dengan syarat tidak lebih dari 250 orang. Jumlah tersebut akan diakui secara otomatis sebagai warga negara. Namun Herzl keberatan dengan opsi tersebut (Dockser, 2007: 49). Peneliti melihat bahwa Herzl akan melakukan langkah-langkah sistematis demi berdirinya negara Yahudi. Disamping motif keagamaan, motif politik memberikan pengaruh yang signifikan. Berdirinya negara Israel minimal menjadi bukti bahwa tesis yang dikembangkan Eugen Karl Duhring tentang wacana pemusnahan Yahudi tidak terbukti. Pada tingkat wacana, Herzl juga menulis sebuah buku berjudul *Der Judenstaat (The Jews' State)* sebagai wacana penyeimbang atas tesis Duhring.

Pendirian negara Israel di kawasan Palestina berkaitan erat dengan lahirnya Deklarasi Balfour. Pada 2 November 1917 M, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour melalui persetujuan sidang kabinet mengeluarkan surat resmi berisi janji kepada bangsa Israel. Surat ini kemudian lebih dikenal dengan Deklarasi Balfour. Selanjutnya surat ini diberikan kepada L. Rothschild, presiden Federasi Zionis Inggris. Dalam Deklarasi Balfour tersebut dikatakan bahwa pemerintah Inggris menyetujui didirikannya sebuah Tanah Air bagi bangsa Yahudi di Palestina, dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melancarkan pencapaian tujuan ini, setelah dipahami secara jelas bahwa tidak akan

dilakukan sesuatu yang dapat merugikan hak-hak sipil dan hak-hak keagamaan komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh setiap bangsa Yahudi di negeri lain.

Menurut Bakar (2008: 223-224), beberapa ahli berpendapat bahwa Deklarasi Balfour inkonstitusional. Inggris tidak memiliki hak sedikitpun terhadap Palestina. Wilayah Palestina bukanlah daerah jajahan Inggris, melainkan dalam kekuasaan Turki Utsmani di Istanbul. Artinya, jika pendirian negara Israel didasarkan atas Deklarasi Balfour, maka hal itu tidak sah.

Inggris punya alasan untuk mendukung Israel. Obsesi Herzl untuk memajukan Palestina,¹⁸ merupakan langkah positif yang harus didukung. Inggris yakin Palestina akan mengalami kemajuan pesat jika negara Yahudi bisa berdiri di sana. Kemampuan Israel dalam pemberdayaan tanah dipandang efektif untuk menjadikan beberapa kawasan di Palestina sebagai area pertanian yang akan memberikan hasil berlimpah karena diolah dengan teknologi dan metode pertanian mutakhir (Armour, 2002b: 155).

Selain Deklarasi Balfour, landasan konstitusi berdirinya negara Israel adalah perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Sykes-Picot merupakan

¹⁸ Theodore Herzl pernah menegaskan kepada Yusuf Khalidi bahwa Yahudi di kawasan Tinur-Tengah akan membawa kemajuan di pelbagai bidang, utamanya perdagangan. Selain itu, Herzl juga menjamin keamanan dan kerukunan antar umat beragama yang ada di sana. Hal ini ditegaskan oleh Herzl demi menarik simpati Yusuf Khalidi agar memperkenankan berdirinya negara Yahudi di Palestina.

perjanjian antara Inggris dan Perancis untuk membagi kekuasaan di Timur Tengah. Inggris menguasai Irak, Jordania dan Haifa di Palestina,¹⁹ sedangkan Perancis memilih Syria dan Lebanon. Selain dua landasan di atas, Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tahun 1947 M merupakan penguat landasan berdirinya Israel. Resolusi tersebut membagi Palestina menjadi tiga bagian. *Pertama*, daerah untuk Negara-Bangsa Israel seluas 57% dari keseluruhan negeri Palestina yang sebagian besar adalah kawasan subur. *Kedua*, daerah untuk negara-bangsa Arab-Palestina seluas 42% meliputi daerah tandus. *Ketiga*, kota Yerusalem sebagai zona internasional (Bakar, 2008: 225-226). Di atas fondasi tiga landasan tersebut, Israel mengokohkan diri untuk mendirikan negara Yahudi yang berdaulat di Palestina.

Meski harus melewati proses yang panjang, pada 4 Mei 1948, David Ben Gurion berhasil mendeklarasikan negara Israel sebagai negara bangsa di atas tanah milik bangsa muslim Palestina. Pada tahap awal, Israel mengkoordinir kelompok-kelompok dari kalangan Yahudi Ortodoks yang siap hidup dan menetap di Palestina. Pada perkembangannya, jumlah penduduk Yahudi meningkat pesat. Jika pada tahun 1922 total penduduk Yahudi berjumlah 83.790 orang, pada tahun 1948 jumlahnya meningkat menjadi 700.000 (Armour, 2002b: 159).

¹⁹ Pada waktu yang sama Inggris memiliki kesepakatan dengan Syarif Husain di Hijaz terkait dengan masa depan Timur-Tengah. Jadi langkah yang diambil pihak Inggris dinilai kurang proporsional.

Demi mengukuhkan eksistensinya sebagai negara, pemerintah Israel meminta dukungan kepada Amerika Serikat dan Inggris. Dua negara ini diharapkan efektif membantu Israel dalam menghadapi perlawanan demi perlawanan yang merongrong eksistensi Israel (Evron, 1995: 133). Setelah kokoh secara infrastruktur, tahun 1950 Israel mengeluarkan deklarasi yang menyatakan bahwa negara Israel terbuka untuk semua imigran Yahudi. Secara otomatis mereka berstatus sebagai warga negara Israel. Langkah semacam ini ditempuh demi memperkokoh eksistensi negara Israel yang diimpikan Herzl (Hiro, 1999: xix-xx).

Bangsa Yahudi-Israel terus melakukan ekspansi. Posisi bangsa Palestina terpojok. Mereka hijrah ke negara tetangga, seperti Mesir, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Hubungan kedua negara pun menegang. Puncak ketegangan adalah ketika Yasir Arafat membentuk *Palestine Liberation Organization* (PLO), Organisasi Pembebasan Palestina didirikan tahun 1969.

Setelah mengamati bagaimana kronologi berdirinya negara Israel, peneliti menemukan beberapa persamaan dengan konflik Perang Salib. Jika pada Perang Salib kedua belah pihak merasa berhak menduduki Yerusalem, pada kasus ini, kedua belah pihak (Israel dan Palestina) dalam posisi berhak menduduki Palestina. Titik persamaan lainnya terletak pada motif. Pada Perang Salib, Paus menyerukan Pasukan Salib untuk melakukan ziarah suci sekaligus merebut Yerusalem dari umat Islam. Penguasaan umat Islam atas Yerusalem dinilai mengancam

eksistensi agama dan ajaran Kristus. Meskipun terjadi silang pendapat, pada konflik Israel-Palestina, Palestina diklaim sebagai daerah yang dijanjikan Tuhan (*promised land*).

Hemat peneliti, kedua konflik ini sarat dengan kepentingan politik, ekonomi dan agama. Pada Perang Salib, aspek politik begitu kental. Pertarungan masing-masing pimpinan dari pasukan Muslim dan Kristen menunjukkan bahwa penguasaan atas tanah Yerusalem menjadi barometer kekuatan. Dari aspek ekonomi bisa dilihat dari ragam respon umat Kristen menyambut seruan Paus untuk melakukan Perang Suci. Dari aspek agama, perebutan Kota Suci Yerusalem menjadi bukti bahwa nuansa keagamaan memberikan warna penting dalam konflik ini.

Pada konflik Israel-Palestina, aspek politik terlihat pada manuver-manuver Barat Barat (Amerika Serikat dan Inggris). Mereka bertekad menguatkan hegemoninya di panggung perpolitikan dunia meskipun dengan cara-cara yang dinilai banyak pihak inkonstitusional. Aspek ekonomi bisa dibaca sejak Herzl memasuki Palestina. Ia melakukan inovasi-inovasi di bidang perdagangan. Komunikasi politik antara Herzl-Ruhi Kholidi dan dukungan Inggris atas berdirinya Israel ini menggiring pada kesimpulan bahwa aspek ekonomi memegang peranan penting dalam konflik ini. Bagaimana dengan aspek agama? Sentimen keagamaan dalam konteks ini terbaca secara jelas ketika umat Islam dan Yahudi sama-sama mengklaim sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan Palestina sebagai negara suci. Keduanya juga saling

menguatkan argumennya dengan dasar-dasar yang mereka ambil, baik dari al-Qur'an atau Injil. Tidak mengherankan jika keduanya dalam posisi berhadap-hadapan. Umat Islam mempertahankan tanah Palestina dan Israel tetap bertekad menguasai seluruh wilayah Palestina (Shlaim, 2000: 598).

C. Hubungan Islam dan Barat Pasca Tragedi WTC

Robohnya gedung *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001 merupakan kejadian fenomenal. Bagaimana tidak? Karena kejadian ini, Islam dan Barat dalam posisi yang seolah-olah saling mengancam. Menurut Bergen (2001: 63), pasca tragedi, jutaan warga Amerika Serikat bertanya; ada apa dengan Amerika? Kenapa harus Amerika? Pelbagai spekulasi pun muncul, termasuk dugaan bahwa tragedi ini dilakukan oleh kelompok jaringan Al-Qaeda.

Implikasi pasca tragedi 9/11 tidak berhenti pada dugaan pelaku,²⁰ tapi juga menjadi penanda wacana dimulainya babak baru konflik Islam dan Barat sebagaimana diprediksikan oleh Bernard Lewis dan Samuel P. Huntington. Keduanya telah menuliskan tesis bahwa akan terjadi benturan peradaban antara Islam dan Barat pasca Perang Dingin. Dan inilah saatnya.

Memanasnya wacana benturan peradaban ini diperparah dengan opini yang datang dari kedua belah pihak. Paus John Paul II melukiskan tragedi tersebut sebagai horor yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat apapun

²⁰ Mereka yang dituduh sebagai pelaku dilabeli sebagai teroris. Istilah "*terror*" yang pertama kali digunakan pada masa Revolusi Perancis pun semakin sering digunakan sebagai ekspresi permusuhan yang melibatkan kedua belah pihak (Elshtain, 2003: 18).

(*Unspeakable Horror*).²¹ Sementara di pihak lain, Osama bin Laden menyebutnya sebagai keputusan yang sangat gemilang (*Glorious Deed*). Dua opini yang kontraproduktif ini ikut menaikkan tensi hubungan antara Islam dan Barat (Elshtain, 2003: 12).

Tragedi 9/11 pada tesis ini peneliti jadikan sebagai simbol kejadian yang menandai kembali ketegangan antara Islam dan Barat. Menurut Daniel Pipes (2002: 137) tragedi yang telah menewaskan lebih dari 3000 jiwa ini bukanlah tragedi yang pertama kali kaitannya dengan ketegangan antara Islam dan Barat. Bisa dikatakan, tragedi 9/11 merupakan kelanjutan sejarah masa lampau.

Dalam pandangan Pipes (2002: 136), tragedi 9/11 sekaligus mempertegas permusuhan kaum militan terhadap Amerika Serikat. Kejadian ini juga dikaitkan dengan serangkaian pembunuhan terhadap tokoh pro Amerika Serikat yang dilakukan kaum militan. Misalnya, pada Juli 1980 terjadi pembunuhan terhadap Ali Tabataba'i oleh David Belfield di Washington DC. Kemudian pada Januari 1990, pembunuhan terhadap Rasyad Khalifah di kawasan Arizona. Sepuluh bulan kemudian Rabbi Meir dibunuh oleh Sayed Nosair yang berkebangsaan Mesir di kawasan New York. Selain itu, kaum militan berkebangsaan Pakistan, Mir Aimal Kansi melakukan serangan terhadap serombongan anggota CIA di Virginia. Pada serangan tersebut, dua orang dinyatakan tewas. Dan masih banyak kisah lain

²¹ Dalam isu kontemporer, tragedi 9/11 ini memberikan efek yang begitu cepat terhadap perubahan iklim perpolitikan terutama yang berkaitan dengan hubungan antara Islam dan Barat. Kaum Islam Militan menjadi tema perbincangan pelbagai media di dunia. Mereka dituduh telah membunuh ribuan jiwa tak berdosa (Amstrong, 2001: vii).

yang menorehkan daftar panjang perilaku kaum militan yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat.

Selain hal di atas, tuduhan terhadap Osama bin Laden pun melahirkan teka-teki. Beberapa sumber menyatakan, Osama bin Laden merupakan mantan ‘anak didik’ Amerika Serikat yang dilatih perang guna membantu Amerika Serikat menghadapi Uni Soviet. Osama membelot dan balik melakukan serangkaian ancaman terhadap Amerika Serikat. Menurut Huggler, (2002: 5) Osama bin Laden adalah anak didik Amerika Serikat. CIA bahkan disebut-sebut membantu Osama bin Laden membangun *camp-camp* tempat latihan para teroris. Data-data ini mengarah pada kesimpulan bahwa Amerika Serikat diduga menjadi *designer* terbentuknya jaringan Al-Qaeda (Bergen, 2001: 63).

Pasca tragedi, hubungan Islam dan Barat mencapai titik klimaks. Pada bagian ini, peneliti akan mengangkat polemik antara Amerika Serikat dan empat negara, yaitu Afghanistan, Irak, Iran dan Palestina dengan tanpa bermaksud menegasikan konflik lainnya. Hal ini demi memudahkan peneliti dalam merunut akar persoalan yang terjadi antara Islam dan Barat kaitannya dengan strategi Obama dalam mengharmoniskan hubungan antara Islam dan Barat. Pertimbangan lain, polemik yang terjadi di empat negara ini telah memproduksi ragam fenomena yang menarik untuk diangkat dalam konteks kekinian dan kaitannya dengan masa lalu hubungan Islam dan Barat.

1. Konflik Afganistan

Pasca Tragedi 9/11 Afghanistan termasuk negara yang paling menyita perhatian dunia. Ia disebut-sebut sebagai tempat persembunyian sekawanan teroris yang berada dalam naungan rezim Taliban²² dan jaringan Al-Qaeda. Serangan itu sangat menghentak publik Amerika Serikat. George W. Bush, Dick Cheney, Condoleza Rice dan beberapa pejabat penting Gedung Putih melakukan koordinasi guna mengambil langkah-langkah strategis terkait tindak terorisme itu. Hasilnya, secara mufakat mereka mendeklarasikan perang melawan teroris dan memutuskan untuk melakukan perburuan di Afghanistan yang diduga menjadi persembunyian anggota Al-Qaeda (Kagan, 2003: 74-76).

Deklarasi perang melawan teroris ini mendapatkan dukungan penuh dari beberapa otoritas keagamaan, yaitu Keuskupan, Kardinal dan segenap Pimpinan Katolik. Mereka menyerukan Bush agar segera mengambil langkah-langkah strategis. Tujuannya tidak hanya menangkap para tersangka tindak terorisme, tapi lebih kepada

²² Taliban adalah gerakan nasionalis Islam Sunni yang menguasai Afganistan sejak tahun 1996 hingga tahun 2001. Kelompok ini hanya mendapatkan pengakuan diplomatik dari tiga negara, yaitu Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Pakistan. Rezim Taliban dikenal dengan berhaluan keras dalam menegakan nilai-nilai Islam. Pemberlakuan ajaran Islam di Afganistan –dalam perspektif beberapa pihak- dirasakan sangat memberatkan, terutama kebijakan yang berkaitan dengan kaum hawa. Fakta menarik yang perlu diungkap adalah mengenai alasan ketatnya pemberlakuan ajaran Islam. Pihak Taliban menegaskan bahwa ketatnya pemberlakuan ajaran Islam tidak lain merupakan upaya menyadarkan masyarakat Afganistan yang dipimpin oleh rezim yang semakin jauh dari tuntunan agama Islam dengan membawa jargon *Peace and Security* (Perdamaian dan Keamanan). Menurut salah seorang tokoh penting dalam pemerintahan Taliban, Arsala Rahmani, sikap yang diambil oleh rezim Taliban semata-mata demi perlawanan terhadap pemerintahan Afganistan yang didukung penuh oleh pemerintahan Amerika Serikat (Herlinger, 2006: 11).

penghancuran rezim Taliban yang berhaluan keras. Menurut (Dempsey, 2002: 177), kelompok berhaluan keras harus diwaspadai karena berpotensi menaikkan suhu perpolitikan dunia, utamanya terkait hubungan antara Islam dan Barat.

Berdasarkan berita yang dilansir oleh Majalah Tempo edisi 8 Oktober 2001 pukul 12:0:11, berikut kronologi detik-detik penyerangan Afganistan oleh serdadu Amerika Serikat.

Pada tanggal 1 Oktober 2001, USS KityHawk meninggalkan pangkalan angkatan laut Yokosuka di Jepang menuju Laut Hindia dan memuat lebih kurang 75 pesawat tempur dengan berbagai tipe. Esoknya (2/10) mantan Kepala Pejuang Mujahidin, Abdul Haq, kembali ke Afghanistan untuk memperkuat front oposisi Taliban. 3 Oktober Menteri Pertahanan AS, Donald Rumsfeld, memulai kunjungannya ke Timur Tengah dan Asia Tengah, untuk mencari dukungan melawan terorisme. Bekas Jenderal AS saat Perang Teluk, Barry McCaffrey, menyatakan serangan AS ke Taliban akan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Perancis melalui Perdana Menteri, Lionel Jospin, menyatakan mendukung AS dan wilayah udaranya diizinkan untuk digunakan oleh pesawat-pesawat AS dan bersedia memberikan dukungan logistik bagi pasukan AS di Laut India.

4 Oktober Kongres Jepang, melalui Perdana Menteri, Junichiro Koizumi, mendukung rencana AS memerangi teroris, dengan menyediakan transportasi pesawat untuk mengangkut para pengungsi keluar dari Afghanistan. Militer Afghanistan sudah melakukan persiapan menghadapi serangan AS dan sekutunya, yang kabarnya semakin mendekat. Pasukan elit Inggris, *Special Air Service* (SAS), siap bergabung dengan pasukan AS, sebagai bentuk dukungan negara tersebut. 5 Oktober Sekitar 1000 tentara AS berada di Uzbekistan, yang berbatasan langsung dengan Afghanistan, setelah negara tersebut mengizinkan salah satu pangkalan udaranya digunakan untuk keperluan pesawat-pesawat AS.

Seorang intelejen senior dari komite senat intelejen AS, memastikan bahwa serangan ke Afghanistan 100 persen pasti terjadi dalam waktu dekat. 6 Oktober Sekitar 10.000 anggota marinir AS melakukan latihan di sebuah gunung batu, Sierra Nevada, sebagai adaptasi terhadap kondisi alam di Afghanistan. Aliansi Utara menggerakkan pasukannya sehingga mendekati 56 kilometer dari kota Kabul.

Inggris mengultimatum Taliban untuk segera menyerahkan Osama bin Ladin. Presiden Georgia, Eduard Shevardnadze, mengizinkan lapangan udara negaranya digunakan AS untuk keperluan menyerang teroris. Menteri Pertahanan AS selesai berkeliling Arab Saudi, Oman, Mesir, Uzbekistan, dan Turki, sebagai sebuah upaya membangun koalisi. Presiden Bush, memperingatkan waktu menyerahkan Usamah telah habis bagi Taliban. 7 Oktober Amerika Serikat dan Inggris menyerang Afghanistan pukul 16.45 waktu setempat.

Konflik Afghanistan termasuk konflik Timur-Tengah yang sangat pelik. Terhitung pasca tragedi 9/11, hingga saat ini pemerintah Amerika Serikat terus melakukan penambahan pasukan. Hal itu dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan keamanan dan menekan kekuatan Taliban dan Al-Qaeda. Pihak Washington menduga anggota jaringan Al-Qaeda dan Taliban masih eksis karena serangan-serangan yang mereka lancarkan masih sangat signifikan.

Apakah ada motif lain selain itu? Menurut Husaini (2005: 90), tidaklah sulit membaca motif atau misi Amerika Serikat di Afghanistan. Dari dulu, Amerika Serikat sudah kenal siapa Taliban. Beberapa jam setelah Taliban menaklukkan Afghanistan pada September 1996, Glyn Davies, pejabat pembantu Juru Bicara Deplu Amerika Serikat menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak keberatan dengan misi Taliban untuk menegakkan Syariat Islam. Di balik dukungan ini, Amerika Serikat hendak menggalang kekuatan dari Taliban untuk membantu Amerika Serikat dalam program pipanisasi minyak dari negara-negara eks-Soviet yang melalui Afghanistan dan Pakistan.

Sebagaimana informasi yang dikeluarkan *Energy Information Administration* (EIA), pada tahun 2020, Amerika Serikat harus mengimpor minyak sebesar 18,8 juta barrel per hari. Setelah mengkalkulasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan, pemerintah Amerika Serikat memandang perlunya program pipanisasi minyak sepanjang 440 mil melalui Afghanistan. Terkait dengan hal itu, Beberapa

pejabat Amerika Serikat melakukan pertemuan beberapa kali dengan pihak Taliban. Hasilnya, Amerika Serikat gagal mendapatkan dukungan dari Taliban.

Peta politik berubah. Amerika Serikat segera menyiapkan kebijakan baru. Taliban pun dicap sebagai musuh yang harus diperangi. Alasannya, Taliban tidak demokratis. Bagaimana dengan Saudi Arabia? Jika alasannya demikian, kenapa Amerika Serikat tidak juga memerangi Saudi Arabia. Bukankah negara itu lebih tidak demokratis? Apakah karena Taliban merupakan militan Islam sehingga harus dimusuhi dan dijadikan sebagai musuh utama oleh Barat sebagaimana dikatakan Bernard Lewis dan Samuel P. Huntington?

Dari fakta-fakta di atas, tampak bahwa motif Amerika Serikat sangatlah beragam. Aspek politik, ekonomi dan agama menjadi faktor penting pecahnya konflik di sana. Dari aspek politik, serangan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat ingin menguatkan hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Perang melawan teroris yang dideklarasikan Amerika Serikat menjadi bukti, ia hendak menunjukkan kekuatannya dan pengaruhnya dalam konstelasi perpolitikan dunia.

Pada aspek ekonomi, ambisi mensukseskan program pipanisasi menunjukkan, Amerika Serikat sedang membutuhkan dana tidak sedikit terkait kebutuhan minyaknya. 18,8 juta barrel bukan jumlah yang kecil jika itu untuk memenuhi kebutuhan sehari. Oleh karena itu, Amerika Serikat melobi Taliban –sebagai penguasa di Afganistan- untuk ikut

mensukseskan program tersebut. Taliban menolaknya. Amerika Serikat pun menganggap Taliban sebagai musuh yang harus diperangi. Menariknya, Amerika Serikat mendeklarasikan perang melawan Taliban sebagai perang melawan radikalisme agama. Jadi, telah terjadi politisasi agama dalam konflik Afganistan.

Alhasil, kepentingan politik, ekonomi dan agama begitu kental mewarnai konflik di Afganistan. Konflik ini terus memanas hingga sekarang. Bahkan, area konflik telah melebar ke Pakistan karena banyak pihak menduga, para teroris bergerak di antara dua negara ini.

2. Konflik Irak

Tahun 2003 adalah tahun bersejarah bagi negara Irak dan Amerika Serikat. Tahun itu merupakan masa dimana sejarah tirani di Irak telah berakhir seiring dengan invasi pasukan koalisi Amerika Serikat dan Inggris ke Irak.

Pada hari Kamis 20 Maret 2003 pukul 05.30 Waktu Baghdad, pasukan gabungan Amerika Serikat-Inggris melancarkan serangkaian serangan ke Baghdad. Target pertama serangan tersebut adalah menangkap Saddam Husein. Serangan tersebut selanjutnya dikenal dengan nama "*Decapitation Attack*". Serangan Amerika Serikat ke Irak melahirkan paradigma baru. Pertanyaan; apa yang diinginkan Amerika Serikat dari negeri Irak ini? pun mengemuka. Benarkah Amerika Serikat hendak menegakkan demokrasi di Irak dengan meruntuhkan tirani Saddam Husein? Apakah Irak dibawah Amerika Serikat akan menjadi

lebih baik? Pertanyaan tersebut merupakan teka-teki di balik invasi tersebut. Teka-teki ini perlu dikaji secara komprehensif.

Beberapa ahli mengatakan, invasi Irak merupakan bagian dari upaya mewujudkan ambisi Amerika Serikat untuk memperkuat hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur-Tengah. Invasi ini disebut-sebut sebagai kelanjutan dari kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Teluk tahun 1991. Muzaffar (2004) menyatakan, kemenangan Amerika Serikat tersebut menjadi lengkap seiring dengan runtuhnya Uni Soviet. Ini berarti Amerika Serikat menjadi negara adikuasa yang memegang kendali dinamika politik dunia.

Menurut Husaini (2005: xxvii) invasi ke Irak tahun 2003 sarat dengan sentimen-sentimen keagamaan. Dukungannya terhadap Israel tidak bisa lepas begitu saja dari jargon “*Gold, Gospel dan Glory*” yang pernah diusung pada masa kolonialisme klasik. Selain itu, invasi ini juga sarat dengan tendensi ekonomi. Salah satu misi ekonomi Amerika Serikat dalam Perang Teluk adalah menguasai minyak dunia dan sektor ekonomi lainnya. Namun impian ini belum bisa direalisasikan seiring dengan kekalahan Bush pada Pemilu Presiden tahun 1992.

Impian yang sempat tertunda itu akhirnya menemukan titik terang disaat Bush Yuniior terpilih menjadi presiden pada Pemilu Presiden bulan November 2000. Pemerintahan Bush ini bahkan telah menyusun agenda besarnya terkait dengan langkah-langkah sistematis Amerika Serikat di kawasan Timur-Tengah dalam rencana bertajuk *National*

Security Strategy (NSS) yang dirilis pada 20 September 2002. Dalam NSS disebutkan, Amerika Serikat akan mengoptimalkan kekuatan militernya untuk menguasai dunia. Invasi Irak juga berhubungan erat dengan kepentingan Israel di Timur-Tengah. Irak yang dengan kekuatan militernya, merupakan ancaman terbesar bagi Israel. Wajar jika invasi Irak ini juga disebut-sebut sebagai Perang Israel.

Selain untuk kepentingan politik di Timur-Tengah, duet Amerika Serikat-Israel juga berencana untuk menguasai sumber daya minyak Irak yang merupakan penyimpan cadangan minyak terbesar di dunia. Kepentingan Amerika Serikat untuk menguasai minyak tersebut diperkuat dengan dua bangunan pemerintahan yang masih utuh saat invasi disaat bangunan lainnya dihancurkan. Dua bangunan tersebut adalah gedung kementerian minyak di Baghdad dan gedung kementerian dalam negeri. Gedung kementerian minyak dianggap penting karena di sana tersimpan dokumen-dokumen penting terkait dengan minyak yang dimiliki Negeri Seribu Satu Malam tersebut. Sementara gedung kementerian Dalam Negeri memegang peranan penting karena disana tersimpan dokumen-dokumen penting terkait dengan keamanan negara.

Selain faktor di atas, faktor lain yang menguatkan tendensi penguasaan minyak adalah kekhawatiran Amerika Serikat terhadap kondisi ekonominya sendiri. Sejak tahun 1971, perdagangan minyak dunia melakukan transaksinya dengan dollar. Namun pada bulan Oktober 2000, Irak melakukan transaksi minyaknya dengan

menggunakan mata uang euro. Bahkan, Venezuela lebih memilih menggunakan barter dengan jasa atau barang dalam transaksinya daripada harus menggunakan dollar.

Di saat banyak pihak mempertanyakan misi sebenarnya dari invasi, Amerika Serikat menegaskan bahwa invasi perlu dilancarkan demi melucuti senjata pemusnah massal yang diproduksi Irak. Sebelum invasi, Amerika Serikat berhasil melakukan lobi ke DK PBB untuk mengeluarkan Resolusi 1441 bulan November 2002 tentang pelucutan senjata Irak. Resolusi inilah yang menjadi dasar legitimasi invasi pasukan koalisi Amerika Serikat dan Inggris ke Irak (Muzaffar, 2002).

Majalah *New Straits Times* edisi 19 April 2003 dalam satu laporannya bertajuk *1000 Hunt for weapons* menjelaskan, tuduhan penyimpanan Senjata Pemusnah Massal tersebut tidak terbukti sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Inspeksi Persenjataan PBB, Dr. Hans Blix.

Dalam Laporan Khusus Gatra edisi 7 Februari 2003 yang bertajuk *Perang Teluk II Permainan Bukti Tebak-Tebakan*, Wilis Pinidji mengungkap beberapa fakta mengenai invasi ini.

Sebelum Amerika Serikat melancarkan serangan ke Irak, George W. Bush sibuk melakukan lobi-lobi politik ke beberapa pimpinan negara yang dianggap bisa membantunya dalam Perang Teluk II ini. Perdana Menteri Inggris, Tony Blair menjadi pemimpin pertama yang dilobi Bush terkait rencananya menginvasi Irak. Selain Blair, ada sederet nama yang telah dilobi Bush, diantaranya Vaclav Havel (Presiden Republik Czech), Hamad bin Isa al-Khalifa (Syekh Bahrain), dan Leszek Miller (Perdana Menteri Polandia).

Bush nampaknya menunggu hingga tanggal 14 Februari 2003 dimana Tim Inspeksi Senjata PBB mengenai senjata nuklir, biologi dan kimia Irak akan diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB. Inilah saat yang dinanti Bush. Jika Saddam Husein tidak kooperatif, Bush akan menekan PBB untuk mengeluarkan

resolusi kedua yang mengesahkan penggunaan kekuatan militer atau menyatakan bahwa Irak telah melanggar resolusi DK PBB No 1441 tentang pelucutan senjata. Inilah yang melegalisasi Bush untuk menyatakan perang. Para perancang perang Pentagon merencanakan Perang Irak setelah umat Islam merayakan hari raya Idul Adha.

Ada fenomena menarik dari kasus ini bahwa data yang disampaikan Tim Senjata PBB pimpinan Hans Blix dengan Ketua Badan Atom Internasional (IAEA), Mohamed El-Baradei kontradiktif. Informasi Hans Blix yang menyatakan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal disanggah oleh Mohamed El-Baradei. El-Baradei menjamin bahwa Irak bersih dari senjata-senjata yang dituduhkan Amerika Serikat. Tim Inspeksi mengatakan, Deklarasi Senjata dan Program Nuklir setebal 12.000 halaman yang diserahkan Irak tidak lain adalah data lama yang belum upgrade. Lebih lanjut El-Baradei menegaskan, Gedung Putih terkesan mengada-ada sesuatu yang tidak mereka ketahui demi melegalkan Perang Teluk II.

Fakta ini menegaskan bahwa kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak tidak bisa dibuktikan. Polemik seputar invasi Irak semakin tajam. Amerika Serikat pun merancang rencana lain. Amerika Serikat dan Inggris melancarkan opini bahwa Irak terkait dengan tragedi 9/11. Sebagaimana dirilis *Stars* edisi 17 April 2003, seorang mantan pemimpin Palestina, Abu Abbas yang pernah terkait tindak terorisme delapan belas tahun yang lalu ditangkap dengan tuduhan terkait aksi 9/11.

Prediksi lain yang mengemuka: apakah Amerika Serikat hendak menciptakan demokrasi di Irak dengan mengalahkan tirani Saddam Husein? Jika pertanyaan itu benar, Muzaffar (2002: 212) menegaskan, kenapa Amerika Serikat dan Inggris baru mempersoalkan kekejaman Saddam Husein sekarang? Bukankah kediktatoran Saddam Husein mencapai klimaksnya pada tahun 80-an, saat dimana Irak menjalin persahabatan dengan Amerika Serikat dan Inggris? Atau, jika alasan Amerika Serikat adalah membela Hak Asasi Manusia, bukankah teman

terbaiknya, Ariel Sharon melakukan pelanggaran HAM dalam serangan di Palestina?

Membincang tentang konflik di Irak memang sangat kompleks. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting dijawab karena akan membuka ambiguitas invasi Irak ini. Melihat fenomena di atas, wajar jika beberapa ahli mengatakan bahwa misi invasi ini sangat jauh dari kesan demokratis. Sebaliknya, perang ini lebih tepat dikatakan sebagai upaya “Penyingkiran Rezim” daripada “Perubahan Rezim”. Dan Amerika Serikat berhasil mewujudkan misinya. Tirani Saddam Husein jatuh dan Irak dibawah otoritas pemerintah Amerika Serikat.

Pasca perang, pemerintah Amerika Serikat telah membentuk pemerintahan bernama *Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance* (Kantor Rekonstruksi dan Bantuan Kemanusiaan) yang diketuai oleh Jenderal (Purn.) Jay Garner yang dikenal pro-Zionis dan Mayor Jenderal Tim Cross. Merekonstruksi Irak bukanlah pekerjaan yang mudah. Jika rekonstruksi itu hanya bersifat fisik yang memerlukan dana triliunan dollar, mungkin bagi Amerika Serikat dan Inggris tidaklah menjadi persolan. Persoalan serius yang harus dihadapi adalah konflik sektarian yang terwarisi secara turun temurun. Secara garis besar, komposisi masyarakat Irak terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Syiah sebanyak 60 %, Sunni sebanyak 37 % dan Kristen sebanyak 3 %.

Seiring dengan pendudukan pasukan koalisi di sana, gelombang penolakan dari masyarakat Irak semakin besar.²³ Mereka beranggapan bahwa Amerika Serikat belum banyak memberikan perubahan positif terhadap Irak. Bahkan korban jiwa terus berjatuhan. Terbentuknya pemerintahan sementara yang dikendalikan Washington ini nampaknya menginspirasi kelompok neo-konservatif di Irak untuk membujuk Iran agar dukungan yang diberikan kepada pejuang Palestina dan Hizbullah dibelokkan ke arah perlawanan terhadap pemerintahan boneka Amerika Serikat di Irak.

Fenomena tersebut tidak hanya ditakuti oleh Amerika Serikat dan Israel, tapi juga oleh beberapa negara di Timur-Tengah yang punya hubungan kurang baik dengan Irak. Mereka pun meningkatkan kewaspadaan. Kalkulasinya, jika perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat di Irak semakin kuat, maka akan memberikan implikasi terhadap kepentingan global, baik kepada Amerika ataupun sekutunya. Ini pula yang menjadi teka-teki; kenapa Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi mengizinkan wilayahnya dimasuki pasukan Amerika Serikat-Inggris kala hendak menginvasi Irak (Muzaffar, 2003: 217).

²³ Sebagaimana dilansir dalam percakapan antara jurnalis kenamaan Inggris Robert Fisk dengan Amy Goodman yang bertajuk "*An Anti-Colonial War Against the Americans May Have Already Begun*" dalam situs Znet tanggal 22 April 2003, bahwa perang besar akan berkecamuk antara Syiah dengan Amerika. Perang ini merupakan bagian terpenting setelah pasukan koalisi menghadapi perlawanan dari Al-Qaeda, sisa-sisa rezim dan rakyat sipil.

Jika dilihat dari beberapa perspektif, Perang Irak memberikan kesan bahwa negara-negara Arab dilanda krisis persatuan. Bangsa-bangsa Arab seolah telah kehilangan empati terhadap saudaranya sendiri. Jika empati terhadap sesama masih ada, setidaknya Perang Irak tidak perlu terjadi atau minimal ditunda. Meskipun dunia mengakui kekuatan militer Amerika Serikat dan Inggris, namun dengan sikap yang *gentle* dari negara-negara Arab –misalnya dengan tidak mengizinkan teritorinya dilalui militer dua negara tersebut- setidaknya invasi ke Irak akan mengalami hambatan.

Pertanyaannya; benarkah sikap para pemimpin Arab tersebut sebagai bukti mereka balas dendam atas masa lalu Irak yang menginvasi Iran dan Kuwait? Dalam hemat peneliti, mengulas persoalan Irak berarti mengulas problem internal negara-negara Arab. Jika dunia menginginkan terciptanya situasi yang lebih stabil di Irak, maka harus ada keberanian dan i'tikad baik negara-negara Arab untuk bersama-sama membicarakan masa depan Irak, terutama negara-negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu Amerika Serikat misalnya Kerajaan Arab Saudi dan Republik Arab Mesir.

Invasi ini terus mendapatkan kecaman. Kecaman tidak hanya datang dari negara-negara yang notabene menjadi penentang Amerika Serikat, melainkan juga dari dalam negeri Paman Sam tersebut. Sewaktu masih menjadi senat, Obama menyatakan penolakannya terhadap Perang Irak. Menurutnya peperangan ini tanpa visi. Obama menilai Perang Irak

sebagai perang bodoh yang dirancang dengan visi yang kosong. Menurutnya, Richard Perle dan Paul Wolfowitz adalah nama-nama yang harus bertanggungjawab terhadap derita masyarakat Irak dan memanasnya suhu politik dunia akibat konflik Irak (Hikmah, 2008: 146). Sebagaimana dilansir dalam *New Straits Times* edisi 26 April 2003 bahwa Direktur Jenderal *British Broadcasting Corporation* (BBC) Greg Dyke menyatakan, *Fox News Channel* (jaringan televisi kabel paling populer selama Perang Irak) ikut bertanggungjawab atas efek buruk yang dihasilkan pasca perang karena siaran-siarannya menunjukkan patriotisme yang berlebihan.

3. Konflik Iran

Sejak lebih dari satu dasawarsa Iran mewakili bentuk ancaman terhadap Barat, terutama dengan figur Ayatullah Khomeini yang tidak lain merupakan lambang revolusi Islam yang agresif dan produktif. Khomeini disebut-sebut sebagai tokoh Islam bernyalai kuat yang secara lantang meneriakkan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Di pelbagai forum, Khomeini menyebut Amerika Serikat dengan *Great Satan* (Setan Besar). Sikap Khomeini ternyata menjadi inspirasi bagi presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad. Ahmadinejad juga dikenal anti Amerika. Sikap-sikap inilah yang membuat keduanya masuk dalam daftar “orang paling dibenci” Amerika Serikat.

Fenomena terkini, Iran terlibat ketegangan dengan Amerika Serikat terkait program pengayaan uranium. Meski telah diberi peringatan oleh

Amerika Serikat, Iran tetap pada pendiriannya. Sikap Iran kepada Amerika Serikat ini berkaitan erat dengan masa lalu Iran, pra dan pasca Revolusi tahun 1979. Bagaimana sebuah revolusi bisa terjadi?

Khomeini dikenal sebagai pribadi yang tegas. Karena sikap itu pula, Khomeini menjatuhkan rezim Muhammad Reza Syah Pahlevi – selanjutnya peneliti tulis Muhammad- yang memerintah selama lebih kurang 30 tahun (1941-1979). Menurut Esposito (1995: 101-102), Muhammad mungkin tidak pernah menduga bahwa kekuasaannya akan dijatuhkan oleh Khomeini yang saat itu bukan siapa-siapa. Muhammad mewarisi sikap dan karakter ayahnya, Reza Syah Pahlevi (1925-1941) yang lebih dulu memerintah. Keduanya mengendalikan agama secara ketat, sehingga para ulama bergerak secara pasif tanpa mampu melakukan perlawanan apapun kepada pemerintah. Pola pemerintahan Muhammad disinyalir menjadi faktor menguatnya perlawanan atas nilai-nilai yang dibawanya. Puncaknya, saat perayaan ulang tahun Persia ke-2500, negara mengeluarkan dana tidak kurang dari 200 juta dolar. Ia mengundang Uskup dari seluruh penjuru dunia. Lebih dari 25.000 botol anggur dipersiapkan untuk berpesat-pora sekaligus menyambut perayaan tujuh hari tujuh malam yang mendatangkan para ahli Maxim kenamaan dari Paris.

Menurut Bill (1988: 176) fenomena ini sekaligus menandai detik-detik akhir kekuasaan Muhammad. Para kaum reformis mengecam kebijakan Muhammad yang tidak mencerminkan sikap arif sebagai

penguasa. Muhammad dianggap tidak peka dengan problematika sosial-ekonomi yang melilit rakyatnya. Pesta yang menghabiskan dana ratusan juta dolar tersebut justru semakin melengkapi penderitaan rakyat yang sebelumnya ditekan dengan kebijakan impor (Ervand, 1982: 448).

Para pengkritik Muhammad termasuk Jalali Ahmad, Mahdi Bazargan, Ali Syari'ati dan Ayatullah Khomeini mulai merancang ide perubahan. Ide ini menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk menciptakan perubahan di negeri Iran. Tidak hanya kaum muda, kalangan profesional sampai dengan *grassroot* pun terbawa oleh ide perubahan yang digagas oleh tokoh-tokoh tersebut (Esposito, 1995: 105).

Ide perubahan menjadi titik kulminasi pelbagai elemen. Perbedaan paham ataupun ideologi tidak lagi penting. Mereka satu kata untuk melakukan melawan Muhammad. Eskalasi politik Iran memanas. Demonstrasi pun mulai dilakukan. Puncaknya terjadi pada tahun 1978. Ketika Muhammad tidak kuasa menahan arus para demonstran, ia melakukan tindakan represif. Puncaknya, pada hari Jumat, 8 September 1978, para tentara dan polisi menembaki kerumunan para demonstran yang jumlahnya mencapai 75.000 orang. Pelbagai lapisan masyarakat bersiap-siap untuk melakukan perlawanan yang lebih besar. Para kaum wanita yang menjadi 'korban busana modern' melepaskannya dan menggantinya dengan jilbab dan cadar dan kemudian bergabung bersama para oposisi.

Klimaks dari arus perubahan yang didengungkan Ayatullah Khomeini dan kawan-kawan terjadi pada tanggal 6 Januari 1979. Muhammad tidak lagi dapat mengendalikan demonstran. Bahkan sebagian besar dari kroni-kroninya membelot setelah melihat Amerika Serikat ragu-ragu untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan Muhammad (Esposito, 1995: 111).

Revolusi Iran menggema di seluruh dunia. Nilai-nilai Islam mulai dilembagakan secara ketat. Jika pada masa Muhammad warga Iran 'dimodernkan', pasca revolusi warga Iran 'diislamkan'.²⁴ Hal ini ditopang oleh ulama-ulama yang militan dan memiliki loyalitas tinggi dalam menanamkan ajaran Islam dalam kehidupan ketatanegaraan. Mereka juga mendapat posisi penting dalam pemerintahan (Arjomand, 1987: 164). Banyak pihak pun kemudian menggambarkan Islam sebagai agama yang besar dan berwibawa yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan Barat. Tidak hanya Barat, negara-negara Timur-Tengah yang selama ini dipayungi Barat pun ikut merasa gelisah dengan keadaan ini (Esposito, 1990).

²⁴ Rezim Reza Syah Pahlevi (1925-1941) dan putranya, Muhammad Reza Syah Pahlevi (1941-1978) membawa perubahan yang sangat dramatis bagi Iran. Dalam rangka mewujudkan ambisinya untuk memodernkan Iran, Pahlevi menempuh pelbagai cara meskipun harus bertabrakan dengan norma-norma keislaman. Ia menjadikan Barat sebagai kiblat dalam semua aspek, mulai dari pakaian, pendidikan, hukum sampai perdagangan. Pada tahun 1920-an rezim ini bahkan mengeluarkan peraturan larangan penggunaan cadar dan membatasi penggunaan jubah. Bagi laki-laki mereka diharuskan memakai pakaian-pakaian *a la* Barat. dalam aspek perdagangan, pedagang-pedagang kecil yang dikenal dengan nama Bazari juga terancam oleh masuknya pemain-pemain kelas kakap dari Barat yang mendapatkan angin segar dan prioritas dari Pahlevi. Sebagaimana Anwar Sadat, Pahlevi merupakan sekutu baik Amerika Serikat. Ia berbicara Bahasa Inggris dan sering muncul di televisi-televisi Amerika Serikat (Esposito, 1995: 103).

“Internationally, the Islamic state has not necessarily led to the strengthening of bonds of unity or to a Pan-Islamic threat. Sadat, the “believer president” had no qualms about supporting the Shah and denouncing the Ayatollah Khomeini as a madman. Egypt’s turn to Islam did not prevent the Organization of the Islamic Conference or the Arab League and most Arab and Muslim governments from breaking diplomatic relations after Egypt signed the Camp David Accords. Qaddafi’s Islamic period paralleled his cool relations both with Sadat’s Egypt and Nimeiri’s Sudan. A lesson to be learned is that while Islam can influence a Muslim nation’s attitude toward greater cooperation or foreign aid, in most cases the overriding determinant will be national interest” (Esposito, 1995: 117).

Masa lalu Iran dan manuver para tokoh reformis inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir presiden Mahmud Ahmadinejad, terutama yang berkaitan dengan sikap terhadap Amerika Serikat. Pokok-pokok pikirannya dikenal keras, tegas dan provokatif. Dalam sebuah seminar, Ahmadinejad pernah menyampaikan statemen yang sangat kontroversial di hadapan lebih kurang 4000 mahasiswa Iran. Ia menegaskan, Israel harus dihapuskan dari peta dunia. Zionisme harus dimusnahkan dari muka bumi. Tidak lama setelah menyampaikan statemen tersebut, Ahmadinejad ikut serta dalam parade Anti-Israel bersama 30.000 warga Iran.

Sejak resmi menjabat Presiden Iran ke-6 pada 3 Agustus 2005, Ahmadinejad terus menata strategi untuk memperkuat stabilitas politik Iran, diantaranya adalah memberdayakan potensi nuklir. Sebagaimana Brazil dan Argentina, pemberdayaan ini dimaksudkan untuk tujuan damai. Sebagaimana dikutip Andrew Purvis dalam kolomnya yang berjudul *Next Steps in the Iran Nuclear Standoff* pada majalah *Time* edisi 10 Agustus 2005, Ahmadinejad mengharapkan semua pihak agar tidak melihat program pengayaan uranium ini dari perspektif politik.

Melihat masa lalu Iran membuat beberapa negara, utamanya Amerika Serikat belum mempercayai statemen Ahmadinejad. Selama ini ia dikenal kurang kooperatif terhadap diplomasi-diplomasi internasional. Berbeda dengan seniornya, Muhammad Khatami (*Time*, Nahid Siamdoust, 3 Agustus 2005).

Selain persoalan nuklir, Amerika Serikat menduga bahwa pemerintahan Ahmadinejad ikut mensupport para anggota Al-Qaeda. Sikap ini telah dibaca sejak Amerika Serikat mendeklarasikan perangnya melawan Taliban. Inilah alasan Amerika Serikat memasukkan Iran sebagai “*Axis of Evil*.” Hubungan antara Teheran dan Washington pun menegang. Banyak pihak mengupayakan dialog antara Teheran dan Washington, namun belum menemui titik terang. Sebagaimana dikutip Scott MacLeod pada kolomnya *Ahmadinejad's Ambitions* pada majalah *Time* edisi 14 Desember 2006, Ahmadinejad menegaskan bahwa kemajuan harus dibangun dengan i'tikad dan komitmen yang baik untuk menciptakan perubahan, bukan dengan manuver-manuver yang bias.

Dalam perkembangannya, pengayaan uranium menjadi isu hangat dalam konstelasi politik Amerika Serikat. Isu inilah yang kemudian menjadi komoditi politik global (*Time*, Johanna McGeary, 26 Maret 2006). Amerika Serikat mulai melakukan lobi ke beberapa negara terkait masalah ini. Jerman, China dan Rusia menyatakan siap memberikan dukungan terhadap usaha Amerika Serikat menghentikan aktifitas pengayaan uranium yang dilakukan Iran. Selain itu, Amerika Serikat

juga mulai intens melakukan komunikasi dengan Iran. Amerika Serikat pernah memberikan opsi bahwa pihaknya akan memberikan insentif dalam jumlah yang signifikan kepada Iran jika menghentikan aktifitasnya tersebut. Namun hal itu tidak mendapatkan respon dari Iran (*Time*, Elaine Shannon, 4 Juni 2006). Berbagai tawaran dan ancaman datang. Namun Ahmadinejad semakin melawan. Ahmadinejad menirukan ucapan Khomeini, “*we will respond to force with force*” (*Time*, Nahid Siamdoust, 17 Desember 2004).

Iran punya masa lalu panjang dengan Amerika Serikat. Karenanya, Iran dirasa mampu bersikap menghadapi tekanan politik Amerika Serikat. Sebagaimana dijelaskan di atas, konflik Iran mempunyai keterkaitan dengan konflik Afganistan. Amerika Serikat mengkhawatirkan kalau aktifitas pengayaan uraniumnya tersebut digunakan untuk mensupport kekuatan Taliban. Dalam hemat peneliti, tidak mustahil jika Amerika Serikat beserta sekutunya mempunyai agenda besar untuk mendapatkan support minyak Iran.

4. Konflik Palestina

Palestina adalah negara yang sangat fenomenal. Jika merunut sejarah, jelas bahwa Palestina adalah negara yang diperebutkan, terutama kota Yerusalem yang diyakini sebagai Kota Suci (*The Holy City*) bagi tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Bahasan ini juga berkaitan erat dengan bab terdahulu yang membahas tentang kontroversi berdirinya negara Israel di Palestina. Pemicunya adalah

landasan-landasan yang oleh beberapa pihak dinilai belum cukup kuat untuk mendirikan negara Israel di kawasan Palestina. Deklarasi Balfour tahun 1917²⁵ dan Resolusi PBB No. 181²⁶ yang selama ini dianggap sebagai dasar berdirinya negara Israel yang berdaulat dianggap inkonstitusional.²⁷ Maka wajar saja jika perlawanan terhadap bangsa Israel diartikan sebagai perlawanan terhadap imperialisme yang menjajah hak orang lain (Esposito, 1995: 73). Konflik di Palestina merupakan konflik antara dua kekuatan besar, yaitu Islam dan Barat. Kenapa? Islam direpresentasikan Hamas sebagai gerakan Islam²⁸ dan Barat direpresentasikan Israel dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan Inggris.

²⁵ Pada bulan November 1917 Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour melalui persetujuan sidang kabinet mengeluarkan sebuah surat resmi yang berisi sebuah janji kepada bangsa Israel. Surat tersebut diberikan kepada L. Rothschild, Presiden Federasi Zionis Inggris. Intinya, pemerintah Inggris menyetujui dan mendukung sepenuhnya berdirinya negara bagi bangsa Yahudi di Palestina (Bakar, 2008: 223-224).

²⁶ Resolusi ini berisi bahwa Palestina dibagi menjadi tiga daerah. Pertama, daerah untuk bangsa Israel seluas 57 % dari wilayah Palestina yang mayoritas bertanah subur. Kedua, daerah untuk Arab-Palestina seluas 42 % yang mayoritas bertanah tandus. Ketiga, kota Yerusalem sebagai Zona Internasional (Hikmah, 2008: 226).

²⁷ Inggris tidak punya hak apapun untuk atas tanah Palestina karena saat itu Palestina di bawah kekuasaan Turki Utsmani di Istanbul. Sementara Resolusi PBB tersebut menunjukkan egoisme Amerika Serikat dalam membela kepentingan Israel. Selain itu, sidang ini sama sekali tidak memberikan ruang bagi warga Palestina untuk menyampaikan aspirasinya.

²⁸ Meskipun di Palestina ada dua kekuatan besar, yaitu Hamas dan Fatah, namun Fatah disinyalir bersikap lunak dengan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat. Hal ini dengan tanpa mengatakan bahwa Fatah adalah kroni Amerika Serikat. Juga, antara Hamas dan Fatah selama ini terlibat konflik berkepanjangan karena ada opsi yang sulit dikompromikan. Hamas beranggapan bahwa Fatah adalah kroni Amerika Serikat. Sementara di pihak lain, Fatah menuduh Hamas menjadi biang kerusuhan di pelbagai wilayah Palestina. Disinyalir, karena kerusuhan inilah, jalan untuk menuju perdamaian semakin suram.

Konflik yang terjadi sekarang ini merupakan lanjutan dari konflik yang telah terjadi ratusan tahun yang lalu. Rollin (2002a: 151) menegaskan, wacana pendirian negara Israel di Palestina merupakan rekomendasi penting dalam Kongres Zionis di Basel tahun 1897. Hal penting yang perlu diangkat di sini, selain motif politik, motif ideologi dan ekonomi ikut memberikan warna penting dalam percaturan politik di Palestina. Terkait dengan motif ideologi (agama), alasan penting berdirinya negara Israel di Palestina karena Palestina merupakan *Promised Land* (kawasan yang dijanjikan Tuhan). Maka, tidak mengherankan jika sebagian ahli berpendapat bahwa pendudukan Israel atas Palestina merupakan upaya untuk mengembalikan haknya.

Bagaimana dengan motif ekonomi? Motif ini berkaitan erat dengan langkah-langkah yang telah dilakukan Teodore Herzl²⁹ saat mengunjungi Yerusalem. Herzl telah menunjukkan prestasinya dalam meningkatkan perekonomian di Palestina, khususnya di Yerusalem. Selain itu, Inggris juga telah menegaskan bahwa salah satu alasan Inggris mendukung Israel bahwa Israel dipandang mampu melakukan terobosan-terobosan mutakhir untuk memperbaiki kualitas perekonomian di Palestina.

Pengungkapan tentang adanya motif ekonomi bisa dilihat dari Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tahun 1947 M. Dijelaskan bahwa bangsa Israel mendapatkan bagian 57% dari keseluruhan kawasan

²⁹ Dalam surat yang ditulis kepada Yusuf Khalidi bahwa ia ingin menciptakan perdamaian sesama dan menjadikan Palestina sebagai kawasan yang maju, utamanya di bidang perdagangan (Dockser, 2007: 46).

Palestina dan sebagian besar adalah kawasan subur. Sementara bangsa Arab-Palestina mendapatkan bagian seluas 42% dan itu daerah tandus (Bakar, 2008: 225-226). Apa yang hendak direncanakan Israel dengan tanah subur seluas 57 % itu?

Peneliti berkesimpulan bahwa selain motif tersebut di atas, landasan-landasan yang dinilai inkonstitusional tersebut menjadi faktor utama bertahannya konflik antara Israel dan Palestina. Sehingga wajar saja jika persoalan Israel-Palestina kini menjadi persoalan internasional.

D. Implikasi Politik Timur-Tengah dalam Politik Global

Setelah mengamati perkembangan di Timur-Tengah sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan konflik di Afghanistan, Irak, Iran dan Palestina, peneliti berkesimpulan, konflik itu demikian kompleks. Kompleksitas polemik ini memberikan implikasi yang sangat luas, tidak hanya di kawasan Timur-Tengah, namun meluas ke negara-negara muslim. Bahkan polemik demi polemik yang terjadi berubah menjadi isu internasional karena ada persoalan-persoalan krusial yang melibatkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai induk organisasi negara-negara di dunia.

Kenapa polemik ini menimbulkan gejolak di negara-negara muslim? Timur-Tengah adalah kawasan 'sakral' bagi negara-negara muslim. Timur-Tengah diyakini sebagai wilayah yang menyimpan sejuta peradaban klasik Islam, misalnya Masjidil Aqsa di Palestina, Masjidil Haram di Saudi Arabia, makam para nabi dan wali yang tersebar di hamparan padang pasir wilayah Timur-Tengah dan sebagainya. Gejolak negara-negara muslim di Timur-

Tengah tersebut ikut pula dirasakan oleh negara muslim lainnya. Maka – dalam hemat peneliti- wajar jika pelbagai polemik yang terjadi memberikan kontribusi besar terhadap munculnya ragam polemik yang bersifat wacana politik-keagamaan.³⁰

Meskipun masih dengan setengah hati, polemik ini turut menyita perhatian PBB.³¹ PBB merasa perlu melakukan intervensi atas polemik ini karena diduga banyak terjadi pelanggaran HAM dan hal-hal lain yang inkonstitusional.

Sejarah telah mencatat beberapa pertikaian di Timur-Tengah yang memberikan implikasi luas di dunia muslim, misalnya Perang Arab-Israel 1967, kericuhan Cina-Malaysia 1969, perang sipil antara Pakistan-Bangladesh 1971 dan perang sipil Lebanon pertengahan tahun 1970. Perang Arab-Israel tahun 1967 bahkan dianggap sebagai bencana besar yang tidak hanya mempertaruhkan negara Mesir, tapi juga mempertaruhkan citra dunia

³⁰ Masih segar dalam memori peneliti bahwa terhitung sejak invasi duet militer Amerika Serikat dan Inggris ke Afghanistan pasca tragedi 9/11, pelbagai wacana keagamaan muncul. Secara umum wacana tersebut berorientasi kepada perlawanan rezim Amerika Serikat yang diposisikan sebagai negara kafir yang menjajah kawasan muslim. Wacana jihad pun semakin santer diperbincangkan. Pada perkembangannya, topik jihad ini meluas pada kajian lain dengan subtansi yang sama, misalnya perlawanan terhadap kaum kafir (intifadah), boikot produk Amerika dan Israel dan bom bunuh diri. Semuanya berorientasi terhadap perlawanan terhadap Amerika dan sekutunya. Bahkan tidak sedikit organisasi-organisasi keislaman yang memberangkatkan para relawannya ke kawasan perang.

³¹ PBB tidak cukup kuat untuk memberikan keadilan atas pelanggaran yang telah dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Misalnya pada konflik Israel dan Palestina. Bukankah landasan berdirinya Israel –berupa Deklarasi Balfour- inkonstitusional? Apakah PBB masih memberikan toleransi berlebih kepada Amerika yang telah memporakporandakan masa depan Irak yang diduga menyimpan Senjata Pemusnah Massal? Amerika seharusnya ‘menyerah’ karena tidak bisa membuktikan kepemilikan Senjata Pemusnah Massal tersebut. Peneliti sepakat bahwa terorisme harus dimusnahkan; Senjata Pemusnah Massal harus dihancurkan; HAM harus dihormati. Namun tidak arif jika upaya memerangi itu semua hanya berhenti pada level wacana dan tidak lebih sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik lainnya.

muslim. Kemenangan Israel yang begitu cepat dan berhasil menduduki dataran tinggi Golan, Sinai, Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari tersebut menjadi pertarungan martabat Arab dan umat Islam. Maka wajar jika masalah regional ini meluas menjadi masalah internasional (Esposito, 1995: 12-13).

Pada konteks ini peneliti hendak menegaskan bahwa hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pemakaian simbol-simbol keagamaan dalam konstelasi politik global. Simbol-simbol keagamaan mempunyai sensitifitas yang tinggi, apalagi jika dibenturkan dengan simbol-simbol Barat. Sebagaimana dalam kasus Saddam Husein di Irak dan Ayatullah Khomeini di Iran. Jika ideologi Islam dikobarkan meskipun demi kepentingan politik rezim tertentu –dalam hemat peneliti- maka ideologi tersebut akan membangkitkan respon dari komunitas lain yang seideologi. Maka wajar saja jika pada Perang Teluk, dunia Arab dan Islam terbagi menjadi dua bagian. Itu disebabkan oleh cara pandang yang berbeda terhadap pemakaian simbol keagamaan (Esposito, 1991: 515).

Pada kasus yang lain, Irak mendapatkan kecaman dari pelbagai pihak saat menginvasi Kuwait. Invasi itu sebagai bentuk keangkuhan politik Saddam Husein. Namun keadaan berubah saat Irak diinvasi Amerika Serikat. Hampir seluruh dunia Islam angkat bicara membela Irak. Publik Islam sejenak lupa akan catatan buruk Sadam Husein (Esposito, 1995: 226).

Pada akhir bab, peneliti hendak menegaskan bahwa dinamika politik di Timur-Tengah memberikan andil besar terhadap dinamika politik dunia

Islam. Kesamaan ideologi dan mainstream, menjadi faktor penting tumbuhnya empati sesama negara muslim. Tidak mengherankan jika konflik demi konflik di Timur-Tengah memberikan dampak serius terhadap hubungan Islam dan Barat atau negara-negara muslim dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Konflik demi konflik yang terjadi menunjukkan bahwa hubungan Islam dan Barat masih problematis, apalagi munculnya konflik banyak dipengaruhi oleh pelbagai aspek, baik politik, ekonomi ataupun agama. Antara konflik yang satu dengan lainnya, memiliki mata rantai yang tidak bisa diputuskan, misalnya kontroversi pendirian negara Israel dan konflik kontemporer di Palestina. Juga, antara Afganistan, Iran dan Irak.